



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 126, 2019

KEJAKSAAN. Rencana Kerja. Tahun
2019.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 001 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, perlu menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019;
- b. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat arah kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2019 yang dimulai pada

tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

- (2) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, memuat arah kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia untuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia melalui perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, terdiri atas:
 - a. Buku I tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini; dan
 - b. Buku II tentang Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Bab I Pendahuluan, terdiri atas:
 1. Latar Belakang;
 2. Tujuan; dan
 3. Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Hukum Dalam Pembangunan Nasional, terdiri atas:
 1. Tema;
 2. Strategi Pembangunan; dan
 3. Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional;
 - c. Bab III Arah Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, terdiri atas:

1. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2019;
 2. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2019;
 3. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2019; dan
 4. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2018;
- d. Bab IV Program Kerja dan Anggaran Kejaksaan Tahun 2019, yang terdiri dari:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan;
 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan;
 4. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
 5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum;
 6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
 7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
 8. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan.
- e. Bab V Penutup
- (3) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terkait dengan pelaksanaan kinerja dan anggaran, bagi:
 - a. Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan;
 - b. Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktorat dan Inspektur;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - e. Atase Teknis Kejaksaan di Luar Negeri; dan
 - f. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun Rencana Kerja Tahun 2019.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib membuat Laporan Kinerja dan Anggaran setiap triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan (*output*), hasil kegiatan (*outcome*), dan indikator kinerja utama masing-masing program/kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pejabat kepada atasan langsung secara berjenjang, kecuali Atase Teknis Kejaksaan di Luar Negeri.
- (4) Laporan Atase Teknis Kejaksaan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (3) ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- (5) Selain Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat membuat laporan apabila diperlukan.

Pasal 5

Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Biro Perencanaan menyusun Laporan Kinerja dan Anggaran Triwulan dan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 001 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional – serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 maka Kejaksaan RI menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 untuk melanjutkan pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-007/A/JA/08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2015-2019) yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi Misi dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengimplementasian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dengan tema **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”** dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (yaitu pemerintah dan swasta).

Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 masih menggunakan prinsip *money follow program* menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar bidang pada Kejaksaan (Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pengawasan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan) untuk tingkat Pusat/ Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri (daerah), dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan).

Pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 merupakan amanat dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 yang menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Khusus untuk prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional secara efektif.

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 ke dalam 5 (lima) Prioritas Nasional meliputi:

- (1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
- (2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- (3) Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya;
- (4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air; dan

(5) stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu, yakni pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, dan anti narkoba; kerangka kelembagaan dan regulasi; serta norma-norma pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 yang menggunakan prinsip *money follow program*, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional ke dalam program Prioritas dan Kegiatan Prioritas. Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka Regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, Sasaran Program untuk tingkat Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan, Sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktorat, Inspektur atau Kepala Kejaksaan Tinggi, serta Kepala Kejaksaan Negeri dan Atase Teknis Kejaksaan di Luar Negeri, maupun komponen dan sub komponennya.

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan serta Rencana Strategis Kejaksaan 2015-2019. Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembangunan di bidang hukum.

Terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, terdapat pergeseran pelaksanaan Prioritas Nasional yang semula adalah Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, saat ini

terfokus pada Peningkatan efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat maupun Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta Penyusunan Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan hasil kejahatan.

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 maka perlu dibuatkan Rencana Kerja Kejaksaaan Tahun 2019 yang memuat program prioritas Kejaksaaan dan kerangka pendanaannya.

B. TUJUAN

Rencana Kerja Kejaksaaan Republik Indonesia Tahun 2019 mempunyai tujuan untuk :

1. Pedoman bagi seluruh Pimpinan Satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung RI, Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktorat, Inspektur, Kepala Kejaksaaan Tinggi, Kepala Kejaksaaan Negeri, Atase Teknis Kejaksaaan di luar negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaaan Negeri) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program prioritas nasional.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 baik kegiatan yang bersifat prioritas nasional maupun prioritas Kejaksaaan secara profesional, proporsional dan akuntabel.
3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 dengan prinsip *money follow program* yang disinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.
4. Pedoman dalam penyusunan laporan kinerja dan anggaran tahunan Tahun 2019.

C. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kejaksaaan Republik Indonesia Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
- Bab II : Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Hukum Dalam Pembangunan Nasional, yang memuat Tema dan Strategi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.
- Bab III : Tema dan Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2019, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2019, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2019 dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2018.
- Bab IV : Program Kerja dan Anggaran Kejaksaan Tahun 2019, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 8 (delapan) Program Kejaksaan, terdiri dari:
- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan;
 - b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan;
 - c. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
 - d. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum;
 - e. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
 - f. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
 - g. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan.
- Bab V : Penutup

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TEMA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dibuat Rencana Kerja Pembangunan sejak Tahun 2015 – 2018 yang dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 adalah “melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan”, kemudian pada Tahun 2016 Rencana Kerja Pemerintah disusun dengan tema “Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas”. Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017 disusun dengan tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 adalah “Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan”. Sebagai perwujudan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 difokuskan pada pembangunan manusia Indonesia dengan tema **“Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas”**.

Penajaman dilakukan terhadap Prioritas Nasional dan Program Prioritas yang semula 10 (sepuluh) Prioritas Nasional menjadi 5 (lima) Prioritas Nasional, dan 30 (tiga puluh) Program Prioritas menjadi 24 (dua puluh empat) Program Prioritas. Penajaman Prioritas Nasional dan Program Prioritas terus dilakukan untuk lebih fokus dan memperkuat Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dengan mengintegrasikan beberapa Kementerian/Lembaga dan daerah (satker lainnya) dalam kegiatan Prioritas Nasional dan dalam Program Prioritas yang berbeda sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang menggunakan prinsip *money follow program*, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas untuk menjaga kesinambungan antara dokumen Perencanaan dan Penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional.

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN NAWACITA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang secara garis besar meliputi :

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 – 2019

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“.

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) **MISI PEMBANGUNAN** yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berlandaskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015–2019 tersebut disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

2. TEMA PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagai bagian dari penjabaran tahun terakhir dari Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 memuat tema : **“Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”** dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM melalui optimalisasi dan pemanfaatan seluruh sumber daya, baik pemerintah maupun swasta. Tema ini merupakan tindak lanjut dan perampingan dari Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dengan maksud/tujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 ke Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, sehingga Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana diamanatkan Konstitusi yang menegaskan bahwa Anggaran Negara dan Daerah adalah instrument untuk mencapai tujuan Nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik Perencanaan dan Anggaran harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*) dan bukan dikendalikan oleh ketersediaan anggaran lagi (*budget-driven*) atau karena tugas dan kewenangan organisasi. Teknis dalam mensinergitaskan antara kerangka perencanaan, kerangka penganggaran dengan kerangka regulasi dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta) dan meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan keadilan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah *Thematic, Holistic, Integrative, Spasial*, yaitu dirumuskan dalam:

- (1) Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja,
- (2) Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi perlu dan
- (3) Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan.

Norma Pembangunan Kabinet Kerja adalah:

1. Pembangunan bersifat holistik komperehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait
2. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah (*entitled society*).
3. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar.
4. Pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem.
5. Pembangunan harus mendukung tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan.
6. Pembangunan bersifat tematik yakni tema tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk Rencana Kerja Pemerintah 2019 dilaksanakan pada 10 (sepuluh) Prioritas Nasional.

Pemerintah juga memfokuskan pada 3(tiga) Dimensi Pembangunan yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang dijabarkan dalam:
 - a. Revolusi Mental (Nawacita ke 8 & 9);
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan; dan
 - d. Perumahan.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang dijabarkan dalam:
 - a. Kedaulatan Pangan;
 - b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Kemaritiman dan Kelautan; dan
 - d. Pariwisata dan Industri (a, b, c, d merupakan Nawacita ke 6 & 7).
3. Dimensi Pemerintahan dan Kewilayahan, yang dijabarkan dalam :
 - a. Antar Kelompok Pendapatan;
 - b. Antar Wilayah : (1) Desa; (2) Pinggiran; (3) Luar jawa; (4) Kawasan timur;
(a dan b merupakan Nawacita ke 3).

Di samping itu Pemerintah juga menyampaikan Kondisi Perlu yaitu :

1. Kepastian dan Penegakan Hukum (Nawacita ke 4);
2. Keamanan dan Ketertiban (Nawacita ke 1);
3. Politik dan Demokrasi (Nawacita ke 9); dan
4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi (Nawacita ke 2).

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Bahwa permasalahan utama Pembangunan Hukum Nasional yang dihadapi pada Tahun 2019 diantaranya adalah:

- (1) Tingginya angka kejahatan siber, narkoba dan konvensional;
- (2) Kerawanan pelaksanaan pemilu dan netralitas Aparatur Sipil Negara;
- (3) Dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara;
- (4) Belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta
- (5) Perlunya perluasan diplomasi yang efektif.

Oleh karena itu disusunlah arah kebijakan dan kerangka regulasi dalam penyusunan Prioritas Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2019

yang mencakup Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu dengan Program Prioritas antara lain:

1. Kamtibnas dan Keamanan Siber;
2. Kesuksesan Pemilu;
3. Pertahanan Wilayah Nasional;
4. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Efektifitas Diplomasi.

Sedangkan yang menjadi kegiatan prioritas dari program kepastian hukum dan reformasi birokrasi diantaranya adalah:

1. Penegakan hukum yang menjadi sasaran dan indikator targetnya adalah dapat terlaksananya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin akses keadilan;
2. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; dimana yang menjadi sasaran dan indikator targetnya adalah Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
3. Pelaksanaan *e-goverment* yang terintegrasi; dalam hal ini yang menjadi sasaran dan indikator target adalah dapat terbangunnya *e-goverment* yang terintegrasi;
4. Manajemen talenta nasional; yang menjadi sasaran dan indikator target adalah terbangunnya kelembagaan talenta Indonesia.

Dalam upaya terwujudnya Program Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Republik Indonesia, Penegakan Hukum yang berkualitas dilaksanakan dengan sasaran dan indikator yang ditetapkan yaitu:

- a. 325 (tiga ratus dua puluh lima) Satker yang mengimplementasikan aplikasi *Case Management System* (CMS);
- b. 8 (delapan) angkatan aparat penegak hukum yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. 4 (empat) angkatan aparat penegak hukum yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- d. 4 (empat) angkatan aparat penegak hukum yang mengikuti pendidikan dan pelatihan *Illegal Fishing*;
- e. 4 (empat) angkatan aparat penegak hukum yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Mineral Batubara:

- f. Tersusunnya *Standar Operating Procedur* penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sedangkan dalam upaya terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dilaksanakan dengan sasaran dan indikator yang ditetapkan yaitu:

- a. 3500 (tiga ribu lima ratus) kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- b. 40 (empat puluh) kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P);
- c. Tersusunnya 15 (lima belas) laporan penanganan pemulihan aset yang terkait dengan hasil kejahatan.

D. PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Pembangunan Hukum dan Aparatur yang memiliki peran penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional. Arah kebijakan yang dituangkan dalam pembangunan bidang hukum dan aparatur bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dengan memperhatikan sasaran dan target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 meliputi:

1. Pembangunan Hukum

Pembangunan Hukum bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan pencapaian target Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, yakni terciptanya kepastian hukum yang didukung melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, pemenuhan akses keadilan serta peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sasaran utama untuk Pembangunan Hukum dimaksud antara lain:

- a. Terlaksananya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin akses terhadap keadilan
- b. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan indikator yang telah dituangkan dalam Prioritas Nasional

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu khususnya
Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

Pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui arah kebijakan :

- Meningkatkan upaya pemberantasan mafia peradilan melalui penguatan integritas dan upaya pengawasan yang optimal di lingkungan lembaga penegakan hukum. Peningkatan akses pengaduan masyarakat dan pengelolaan pengaduan dilakukan untuk menjamin akuntabilitas penegakan hukum.
- Meningkatkan budaya hukum masyarakat melalui diseminasi hukum oleh lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya.
- Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi dan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia.
- Meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan Hak Asasi Manusia.
- Meningkatkan kualitas pelayanan hukum melalui :
 - o Mekanisme mediasi, gugatan sederhana (*small claim court*), dan inovasi layanan lainnya di pengadilan;
 - o Pelayanan keimigrasian, administrasi hukum umum, pemasyarakatan dan hak kekayaan intelektual;
 - o Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan dukungan teknologi informasi yang proporsional dalam mendukung penegakan hukum.

2. Pembangunan Aparatur

Sasaran pembangunan bidang aparatur bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan pencapaian target Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, yaitu meningkatnya kualitas reformasi birokrasi instansi, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran pembangunan bidang aparatur Tahun 2019, antara lain:

- Menguatnya implementasi reformasi birokrasi instansi
- Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Program Prioritas Kepastian Hukum, untuk Kejaksaan RI dilaksanakan dengan indikator dan sasaran kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi
1	Penegakan Hukum	<p>Terlaksananya Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel serta menjamin akses keadilan</p> <p>a. 325 (tiga ratus dua puluh lima) Satker yang mengimplementasikan aplikasi <i>Case Management System (CMS)</i>;</p> <p>b. 8 (delapan) angkatan aparat penegak hukum yang mengikuti diklat terpadu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan RI;</p> <p>c. 4 (empat) angkatan aparat penegak hukum yang mengikuti Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan;</p> <p>d. 4 (empat) angkatan aparat penegak hukum yang mengikuti Diklat <i>Illegal Fishing</i>;</p> <p>e. 4 (empat) angkatan aparat penegak hukum yang mengikuti Diklat Mineral Batubara;</p> <p>f. Tersusunnya <i>Standar Operating Procedure</i> penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>	<p>Pusat dan Daerah</p> <p>Pusat</p> <p>Pusat</p> <p>Pusat</p> <p>Pusat</p> <p>Pusat</p>
2	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi	

- a. 3.500 (tiga ribu lima ratus) Daerah kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- b. 40 (empat puluh) kegiatan Tim Pusat Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P);
- c. Tersusunnya 15 (lima belas) Pusat laporan penanganan pemulihan aset yang terkait dengan hasil kejahatan.

Adapun Kegiatan Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 direncanakan akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Prioritas : Penegakan Hukum.

No	Program	Kegiatan	Sasaran / Indikator	Target
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Implementasi aplikasi <i>Case Management System</i> (CMS) untuk mendukung <i>Pilot Project</i> SPPT berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya Implementasi aplikasi <i>Case Management System</i> (CMS) untuk mendukung <i>Pilot Project</i> SPPT berbasis Teknologi Informasi	325 (tiga ratus dua puluh lima) Satker
2	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI	Diklat terpadu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) di Kejaksaan RI	Terlaksananya Diklat terpadu UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan RI	8 (delapan) angkatan
		Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan	4 (empat) angkatan
		Diklat <i>Illegal Fishing</i> ;	Terlaksananya Diklat <i>Illegal Fishing</i>	4 (empat) angkatan
		Diklat Mineral Batubara	Terlaksananya Diklat Mineral Batubara	4 (empat) angkatan

3	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Penyusunan <i>Standard Operating Procedure</i> Penanganan Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Tersusunnya <i>Standard Operating Procedure</i> Penanganan Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1 (satu) Rekomendasi
---	--	---	--	----------------------

2. Kegiatan Prioritas : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

No	Program	Kegiatan	Sasaran / Indikator	Target
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik Indonesia	Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Kejahatan	Tersusunnya laporan penanganan pemulihan aset yang terkait dengan hasil kejahatan	15 (lima belas) laporan
2	Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah	3.500 (tiga ribu lima ratus) kegiatan
		Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P)	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan	40 (empat puluh) kegiatan

Pemerintahan
dan
Pembangunan
di Pusat

Dengan demikian, ada 2 (dua) kegiatan prioritas Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi Program Prioritas Nasional, yang harus dilaksanakan pada Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019.

BAB III
ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019

A. TEMA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2019

Mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yaitu **“PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”**, diharapkan mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional, terutama didalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan percepatan dan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun terakhir ini, fokus pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan tetap mempertahankan momentum kecepatan pembangunan infrastruktur.

Tema ini sepertinya tidak secara langsung bersinggungan kepada peran serta penegakan hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondusifitas iklim investasi dan pembangunan infrastruktur tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan, sehingga peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tidak dapat terlepas dan tetap menjadi bagian bagi tercapainya optimalisasi pelaksanaan pembangunan melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya memberikan jaminan kepastian hukum di Indonesia. Untuk itu, maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2019 disusun dengan tema **“OPTIMALISASI KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERINTEGRITAS, BERWIBAWA DAN BERKUALITAS”**, hal ini memberikan indikasi bahwa Kejaksaan terus berbenah dalam kinerja untuk memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, hal ini tentunya diyakini akan dapat memberikan rasa nyaman dan aman sehingga menumbuhkan

perekonomian serta membangun kepercayaan *stakeholder* dan dapat meningkatkan investasi di berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dapat mendorong tersedianya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, serta untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sehingga gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diminimalisir.

Kejaksaan yang memiliki Visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yaitu **“MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL”**

Tema dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tersebut mengandung makna bahwa:

- a. Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga Penegak Hukum di Indonesia mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana: melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah serta di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, melakukan upaya antara lain:
 - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan
 - Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

- b. **Profesional:** segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA, kompetensi, kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, ketrampilan yang memadai dan berpegang teguh pada peraturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- c. **Proporsional:** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan menggunakan semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. **Akuntabel:** kinerja aparatur Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengambil tema tersebut diatas, diharapkan pada Tahun 2017, aparat Kejaksaan Republik Indonesia dapat meningkatkan profesionalitasnya, dan menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

B. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2019

Dalam rangka mencapai Visi Kejaksaan Republik Indonesia di atas, maka telah ditetapkan Misi Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; dan

5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan negara;
2. Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan;
3. Meningkatnya kewibawaan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia; dan
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode Tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata;
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum;
3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum; dan
5. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2019

Arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mempunyai visi : "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI adalah serangkaian upaya dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penentuan arah kebijakan dan strategi ini, Kejaksaan Republik Indonesia mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam pelaksanaannya, yaitu tentunya tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah melalui 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

D.REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2018

Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 mengambil tema "***Kukuhkan Semangat Baru, Bangun Persepsi dan***

Citra Diri, Ukir Prestasi Untuk Negeri”, sebagai sebuah pilihan yang sangat relevan dengan kondisi kekinian, karena setidaknya mengandung 3 (tiga) pokok pemikiran.

Pertama, Mengukuhkan Semangat Baru yaitu Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk senantiasa melakukan perubahan fundamental dalam peningkatan kompetensi, sekaligus membangkitkan kesadaran baru untuk terus berbenah, serta tidak larut dan terperangkap pada pola *business as usual* yang mengedepankan cara-cara *using* dalam menjawab persoalan dan tantangan pelaksanaan tugas sehari-hari. Keberanian melakukan tindakan yang tidak hanya sekedar *out of the box*, melainkan juga *there is no box* yang kadang kala mengharuskan Aparat Penegak Hukum membuat terobosan untuk melakukan hal yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya, bahkan di luar kebiasaan, namun menjadi mutlak dibutuhkan sebagai kebijakan dan cara pandang saat menghadapi perubahan serta situasi kebutuhan mendesak, sepanjang apa yang dilakukan tidak menyalahi aturan dan semata-mata ditujukan hanya untuk menciptakan sesuatu yang memang benar berdayaguna dan mendatangkan kemanfaatan besar bagi masyarakat.

Kedua, Bangun Persepsi dan Citra Diri yaitu dalam era disrupsi, yang meskipun di satu sisi membawa dampak negatif akan tetapi pada sisi lain membawa peluang yang sangat besar bagi siapapun yang mampu memanfaatkannya dengan baik. Disrupsi menuntut dilakukannya perubahan cara pandang sebuah masalah, sehingga nantinya dapat dipilih dan ditentukan cara maupun metode yang terbaik untuk menghadapi perkembangan tersebut. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh untuk membangun persepsi positif terhadap Kejaksaan RI adalah melalui transformasi digital di Kejaksaan Republik Indonesia secara utuh dan menyeluruh, bukan secara parsial dan sporadis. Hal tersebut dapat dipahami mengingat pemanfaatan teknologi di Kejaksaan Republik Indonesia sudah terpaut cukup jauh dibandingkan Institusi lain. Digitalisasi Birokrasi menjadikan *business process* dapat berjalan secara cepat dan efektif tanpa terkendala dimensi ruang dan waktu, karena pada suatu saat, kapanpun, dan dimanapun setiap pejabat struktural dapat memberikan instruksi kepada bawahan secara bersamaan dengan pelaksanaan tugas lainnya. Begitu pula dengan penyiapan informasi dan pelaporan kepada *User* yang dapat dilakukan secara *realtime*, *paperless*, cepat dan akurat melalui *gadget* atau *smartphone* sehingga pimpinan dapat

segera memikirkan dan menginstruksikan solusi tindak lanjutnya. Disamping itu Digitalisasi Birokrasi juga diyakini akan menjadi salah satu pondasi yang teramat penting untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas institusi karena dapat mempermudah pemantauan kinerja sekaligus dapat mempercepat pelayanan publik.

Ketiga, Ukir Prestasi untuk Negeri yaitu menjelang tahun terakhir Rencana Strategis Tahun 2014-2019 telah banyak program pembangunan yang berhasil dicapai dan diwujudkan, hal tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan nasional telah berada di jalur yang benar, dan untuk menjaga keberlangsungannya diperlukan dukungan kuat khususnya di bidang hukum agar hukum dapat ditegakkan dengan baik dan benar, sehingga tidak hanya berkutat pada perspektif hukum *an sich*, tetapi mampu mengawal dan mengamankan serta menciptakan suasana kondusif bagi terlaksananya seluruh program pembangunan nasional di segala bidang yang direncanakan. Bertitik tolak pada realitas tersebut, maka jajaran Kejaksaan RI tanpa terkecuali harus mampu mengambil bagian dan berpartisipasi aktif untuk menyelaraskan diri dengan langkah dan kebijakan yang dicanangkan melalui tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia selaku Aparat Penegak Hukum. Salah satu langkah konkritnya adalah melalui kesiapan dan keteguhan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang acapkali diwarnai perbedaan pandangan politik yang berpotensi menimbulkan kerawanan yang pada akhirnya bermuara pada proses penegakan hukum. Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab Kejaksaan Republik Indonesia menjadi sangat luas tidak hanya sekedar dituntut untuk menghadirkan Penegak Hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel dalam rangka menjaga dan merawat demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga sekaligus harus menjaga bagaimana agar proses pemilihan umum dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar, karena pemilu tanpa pengawasan dan pengamanan sama halnya dengan membiarkan pesta demokrasi tanpa integritas dan keadaban. Disamping itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah segenap personil Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Aparatur Sipil Negara mampu menjaga netralitas dalam pemilihan umum, yang seharusnya tidak hanya ditunjukkan dalam penanganan perkara tindak pidana pemilihan, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta didalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sikap proaktif dari Aparatur Kejaksaan

Republik Indonesia yang semata-mata ditujukan untuk mensukseskan pembangunan nasional, nantinya Kejaksaan Republik Indonesia akan mampu mengukir berbagai prestasi yang bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan institusi belaka, melainkan diarahkan dan ditujukan untuk kemajuan Negeri sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga pokok pemikiran yang termuat dalam tema Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pelebagaan antisipasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman yang kini tengah berada pada era revolusi industri 4.0 (*the fourth industrial revolution*).

Adapun rekomendasi hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BIDANG PEMBINAAN

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi A, telah diinventarisir beberapa pokok permasalahan, pemecahan masalah dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kejaksaan belum berjalan secara paralel dengan rencana yang sudah disusun dalam dokumen Informasi dan Teknologi *Masterplan* Kejaksaan Tahun 2015 – 2019.

Pemecahan Masalah:

Diperlukan adanya sinergitas dan integrasi pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi masing-masing Bidang dan Satuan Kerja untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih inisiatif Teknologi Informasi dan Komunikasi .

Rekomendasi:

Membentuk Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertugas mensinergikan dan mengintegrasikan pengembangan dan penerapan TIK masing-masing Bidang dan Satuan Kerja.

Penanggung jawab:

- Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- Kepala Biro Perencanaan.
- Kepala Pusat Data, Statistik Kriminal, dan Teknologi Informasi.

2. Belum optimalnya pengelolaan data perencanaan Kejaksaan Republik Indonesia yang meliputi program kerja dan anggaran, organisasi dan tata laksana.

Pemecahan Masalah:

Mengembangkan Sistem Perencanaan berbasis Informasi dan Teknologi, yang mampu menyiapkan dan menghimpun data secara lengkap dan akurat agar dengan mudah dan cepat dapat dipergunakan sebagai bahan dan acuan dalam proses penyusunan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan serta besaran anggaran yang diperlukan.

Rekomendasi:

Menerapkan dan mengembangkan aplikasi sistem perencanaan Kejaksaan Republik Indonesia.

Penanggung jawab:

- Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- Kepala Biro Perencanaan.
- Kepala Biro Keuangan.
- Kepala Pusat Data, Statistik Kriminal, dan Teknologi Informasi.
- Kepala Kejaksaan Tinggi.
- Kepala Kejaksaan Negeri.
- Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

3. Kurangnya jumlah Satuan Kerja yang membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemecahan Masalah:

Meningkatkan jumlah Satuan Kerja yang membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri ibukota provinsi, dan Kejaksaan Negeri yang dinilai memenuhi syarat.

Rekomendasi:

Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Ibu Kota Provinsi, dan Kejaksaan Negeri yang dinilai memenuhi syarat.

Penanggung jawab:

- Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- Kepala Biro Perencanaan.
- Kepala Kejaksaan Tinggi.
- Kepala Kejaksaan Negeri.

4. Tata kelola administrasi persuratan yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan ketentuan kearsipan.

Pemecahan Masalah:

Penyesuaian/harmonisasi terkait ketentuan/peraturan tentang tata kelola administrasi persuratan dan/atau kearsipan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Rekomendasi:

- Membuat Peraturan Jaksa Agung terkait tata kelola administrasi kearsipan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang meliputi:
 - Tata Naskah Dinas;
 - Kode Surat;
 - Jadwal Retensi Arsip
- Membuat dan mengelola arsip secara digital (*e-arsip*)

Penanggung jawab:

- Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- Kepala Biro Umum.
- Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

5. Belum optimalnya penanganan dan penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan.

Pemecahan Masalah:

Penanganan dan penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan yang belum terselesaikan dilakukan dengan inventarisasi yang lebih cermat dan lengkap termasuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi, guna menentukan solusi penyelesaiannya.

Rekomendasi:

- Menyelesaikan tunggakan benda sitaan dan barang rampasan dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan/Barang Rampasan Negara/Benda Sita Eksekusi.

- Membuat Petunjuk Teknis tentang mekanisme kerja, tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

Penanggung jawab:

- Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- Kepala Pusat Pemulihan Aset.
- Kepala Kejaksaan Tinggi.
- Kepala Kejaksaan Negeri.

B. REKOMENDASI BIDANG INTELIJEN

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi B, telah diinventarisir beberapa pokok permasalahan, pemecahan masalah dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perubahan Administrasi Intelijen dan *Standar Operasional Prosedur* sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja bidang Intelijen Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Pemecahan Masalah:

Segera dilakukan perubahan Administrasi Intelijen Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 dan *Standar Operasional Prosedur* Intelijen Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-037/A/JA/09/2011 sesuai dengan organisasi dan Tata Kerja Bidang Intelijen Kejaksaan berdasarkan PERJA 006/A/JA/07/2017.

Rekomendasi:

- Terbitnya Peraturan Jaksa Agung tentang Administrasi Intelijen dan *Standar Operasional Prosedur* Intelijen sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja bidang Intelijen Kejaksaan sesuai PERJA 006/A/JA/07/2017 pada Triwulan I Tahun 2019.
- Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung tentang Administrasi Intelijen dan *Standar Operasional Prosedur* Intelijen pada Triwulan II tahun 2019.

Penanggung jawab:

- Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen.
- Para Direktur, Kepala Pusat Penerangan Hukum, dan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

2. Diperlukan reformasi Penguatan fungsi pengawalan dan pengamanan proyek pembangunan strategis serta harmonisasi antara bidang Intelijen, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan bidang Tindak Pidana Khusus terkait pelaksanaan fungsi intelijen.

Pemecahan Masalah:

- Terciptanya kesamaan persepsi dan harmonisasi antara bidang Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara dan Pidana Khusus terkait dengan pelaksanaan Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan dengan memposisikan Bidang Intelijen sebagai *leading sector* disamping juga sebagai unit pelaksana. Namun dalam hal permintaan pendampingan yang lebih memerlukan dibuatnya *legal opinion*, *legal assistance*, dan *legal audit* maka dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.
- Sedangkan penindakan hukum secara represif oleh bidang Pidana Khusus dilakukan jika ditemukan penyimpangan hukum (Tindak Pidana Korupsi) secara sengaja serta ditemukan cukup bukti kuat, dan mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yang sebelumnya dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Rekomendasi:

- Penguatan fungsi intelijen dalam rangka pengamanan pembangunan strategis.
- Menyusun *Standar Operasional Prosedur* dan Petunjuk Teknis pelaksanaan fungsi Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan.

Penanggung jawab:

Direktur D

3. Belum optimalnya Program Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Pesantren, dan Jaksa Masuk Kampus dikalangan generasi milenial.

Pemecahan Masalah:

Pemanfaatan metoda dan media yang lebih kreatif dan inovatif, melalui *audio* dan *video-streaming*, *Instagram*, *Facebook*, *YouTube*, maupun media sosial lainnya.

Rekomendasi:

Mengintegrasikan pengelolaan media sosial yang dimiliki seluruh unit kerja di Pusat dan di Daerah secara terpadu melalui *tagline* Jaksa Sahabat Masyarakat guna percepatan publikasi dan diseminasi kinerja institusi, dalam rangka pemulihan *public trust* terhadap Kejaksaan Republik Indonesia dengan membuat *Standar Operasional Prosedur* Sosial Media di lingkungan Kejaksaan.

Penanggung jawab:

Kepala Pusat Penerangan Hukum.

4. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan deteksi dini di bidang Pencarian Buronan Pelaku Kejahatan, Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat, media komunikasi, Organisasi Masyarakat, potensi konflik Sosial, ketahanan budaya, dan pemberdayaan masyarakat desa, Pengawasan Barang cetakan, dan Pengawasan Orang Asing sebagai bagian dari peran Kejaksaan turut melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketertiban dan ketentraman umum.

Pemecahan Masalah:

Optimalisasi pengelolaan situs Jaga Negeri, Aplikasi Jaga Desa dan Sistem Informasi Tangkap Buronan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Rekomendasi:

Membuat landasan kerja sama dalam rangka mengkoneksikan situs Jaga Negeri, Jaga Desa dan Sistem Informasi Tangkap Buronan dengan sistem teknologi informasi di Kementerian/Lembaga terkait.

Penanggung jawab:

Direktur E

5. Belum efektifnya pemanfaatan Pos Perwakilan Kejaksaan RI di bandara, pelabuhan dan tempat tertentu agar dapat berperan optimal sebagai pintu terdepan dalam mengawasi lalu lintas manusia maupun barang.

Pemecahan Masalah:

Mengefektifkan pemanfaatan Pos Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di bandara internasional, pelabuhan bebas, kantor pos besar dan tempat tertentu melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendeteksi segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan gangguan keamanan.

Rekomendasi:

Membuat landasan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendukung Standar Operasional Prosedur kegiatan Pos Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di bandara internasional, pelabuhan bebas, kantor pos besar dan tempat tertentu.

Penanggung jawab:

Direktur B

6. Kurangnya produk intelijen terkait antisipasi kemungkinan adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan pada saat penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Pemecahan Masalah:

Meningkatkan produk Intelijen dalam bentuk Perkiraan Keadaan, pemetaan titik rawan pemilu serta peningkatan hubungan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan berbagai elemen masyarakat lainnya dalam rangka deteksi dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan pada saat penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Rekomendasi:

Menyusun petunjuk teknis pemanfaatan *Adhyaksa Command Centre* sebagai metode pelaporan secara *paperless* dan *real time* di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Penanggung Jawab:

Direktur A

7. Kurangnya produk intelijen di bidang pencegahan, disebabkan Pengumpulan Data/Pengumpulan Bahan Keterangan tentang Ekonomi dan Keuangan masih berorientasi pada sektor penyimpangan Tindak Pidana Korupsi

Pemecahan Masalah:

Optimalisasi kegiatan Penyelidikan oleh Intelijen Kejaksaan di bidang pencegahan tindak pidana terkait masalah ekonomi dan keuangan, serta potensi kerugian keuangan negara.

Rekomendasi:

Unit Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri menghasilkan produk Intelijen mengenai kondisi ekonomi keuangan di wilayah hukumnya dengan *output* berupa saran/tindak terkait upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan percepatan pembangunan/peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana dan kerugian keuangan negara dengan target Kejaksaan Tinggi sebanyak 2 (dua) Laporan Operasi Intelijen, dan Kejaksaan Negeri sebanyak 1 (satu) Laporan Operasi Intelijen.

Penanggung jawab:

Direktur C.

C. REKOMENDASI BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi C, telah diinventarisir beberapa pokok permasalahan, pemecahan masalah dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Belum terselesaikannya revisi Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang *Standar Operasional Prosedur* Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum sesuai standar baku Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan *Standar Operasional Prosedur* Administrasi Pemerintahan.

Pemecahan Masalah:

Diselesaikannya revisi Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 dengan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dengan memperhatikan perkembangan kebaruan hukum yang ada.

Rekomendasi:

Finalisasi, sosialisasi dan digitalisasi Revisi Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang *Standar Operasional Prosedur* Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Penanggung jawab:

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

2. Belum adanya sistem pencatatan tahanan secara kronologis (*audit trail*) atas keseluruhan proses penanganan perkara dan perubahan status

tahanan sehingga tidak menjawab kebutuhan zaman melalui mekanisme percepatan proses, automisasi dan mudah diakses.

Pemecahan Masalah:

Diperlukan penatakelolaan tahanan yang lebih baik yaitu terdokumentasi, terlacak serta mudah diakses pengawal tahanan dengan penggunaan metoda komputasi gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet *Cloud Computing (Cloud Computing)* yang menghasilkan tata kelola kontrol tahanan terdokumentasi dan terlacak berbasis teknologi informasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menghindarkan pengabaian terhadap hak untuk segera memperoleh informasi akan status tersangka/terdakwa (*immediate acces to justice*).

Rekomendasi:

- Membentuk tim untuk menyiapkan, merumuskan dan membuat desain.
- Melakukan observasi pada daerah *pilot project*.
- Penetapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terhadap satuan kerja yang menjadi *pilot project*.
- Menyiapkan rencana sosialisasi.

Penanggung Jawab:

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

3. Belum adanya kesesuaian antara jenis perkara dengan direktorat baru berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah merestrukturisasi bidang Tindak Pidana Umum.

Pemecahan Masalah:

Revisi terhadap Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-027/A/J.A/03/1994 tentang Pengelompokan Jenis-Jenis Perkara Tindak Pidana Umum

Rekomendasi:

Membentuk tim untuk menyiapkan, merumuskan dan menyusun rancangan perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-027/A/J.A/03/1994 tentang Pengelompokan Jenis-Jenis Perkara Tindak Pidana Umum.

Penanggung jawab:

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

4. Belum adanya pedoman tuntutan pidana yang mudah dipahami dan diakses sebagai lampiran rancangan pedoman tuntutan pidana baru menggantikan SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum sebagai hasil rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2015-2017 yang telah diajukan rancangannya melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Pedoman yang baru mencerminkan re-orientasi terhadap pembedaan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia.

Pemecahan Masalah:

Lampiran SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana tetap dipertahankan, namun tidak dalam bentuk manual yang selama ini menimbulkan masalah karena sulit dipahami. Maka diperlukan pedoman tuntutan pidana yang lebih mudah dibaca dan diakses berbentuk aplikasi elektronik sebagai lampiran rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yang baru untuk mencabut dan menggantikan SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Rekomendasi:

- Membentuk tim untuk menyiapkan, merumuskan dan membuat design aplikasi elektronik pedoman tuntutan pidana sebagai lampiran rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yang baru.
- Sosialisasi Pedoman Tuntutan Pidana Baru dan proses *install* (memasang program perangkat lunak) aplikasi pedoman tuntutan pidana elektronik ke dalam komputer.

Penanggung jawab:

- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
 - Kepala Kejaksaan Tinggi
 - Kepala Kejaksaan Negeri
 - Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
5. Belum adanya penatakelolaan benda sitaan, barang temuan, barang bukti dan barang rampasan berupa catatan kronologis kegiatan seperti aktivitas keluar masuk dan perubahan status.

Pemecahan Masalah:

Diperlukan penatakelolaan benda sitaan, barang temuan, barang bukti dan barang rampasan yang memiliki catatan kronologis merekam sejak diterima sampai diselesaikan dalam tata kelola rantai pengelolaan barang sitaan, barang temuan, barang bukti dan barang rampasan (*chain of custody*) berbasis elektronik.

Rekomendasi:

- Membentuk tim untuk menyiapkan dan merumuskan rancangan *Standar Operasional Procedure* Penatakelolaan Barang Bukti.
- Menyiapkan rencana sosialisasinya .

Penanggung Jawab:

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

6. Belum adanya petunjuk teknis ketentuan penyelesaian perkara tindak pidana pemilu tanpa kehadiran tersangka/terdakwa (*in absentia*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemecahan Masalah:

Perlu dibuat petunjuk teknis penyelesaian perkara tindak pidana Pemilihan Umum tanpa kehadiran tersangka/terdakwa (*in absentia*).

Rekomendasi:

- Membuat petunjuk teknis pemanggilan tersangka/terdakwa setidaknya 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 3 (tiga) hari, dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan sesuai kediaman Tersangka/Terdakwa. Surat Panggilan dimaksud mencantumkan klausul peringatan dalam Surat Panggilan tersangka/terdakwa bahwa ketidakhadiran tersangka/terdakwa akan melepaskan hak-haknya dalam pembelaan, menghadirkan saksi *a de charge*, maupun hak mengajukan upaya hukum dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018.
- Mencantumkan keterangan perkara dilimpahkan dengan tanpa kehadiran terdakwa dalam Surat Pelimpahan Perkara ke Pengadilan (formulir P.31).

Penanggung Jawab:

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

D. REKOMENDASI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi D, telah diinventarisir beberapa pokok permasalahan, pemecahan masalah dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pembaruan pola pikir (*mindset*) dan pola tindak di jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus dengan mengimplementasikan 6 (enam) area perubahan untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani guna meningkatkan kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus.

Pemecahan Masalah:

Perubahan pola pikir (*mindset*) dan pola tindak pada jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus dengan melaksanakan:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penata Tata Laksana;
- 3) Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
- 4) Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Penguatan Pengawasan; dan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Rekomendasi:

Mendorong satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri untuk ikut serta dalam program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, khususnya pada Bidang Tindak Pidana Khusus.

Penanggungjawab:

- Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Tindak Pidana Khusus
- Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Seksi Pidana Khusus
- Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana

2. Berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya memberikan pendelegasian wewenang dalam pengendalian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam pelaksanaannya

masih menimbulkan perbedaan pemahaman dan telah menghilangkan fungsi kontrol penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.

Pemecahan Masalah:

Perlu dilakukan revisi dan *reviu* (perubahan/penambahan) parameter baru dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Rekomendasi:

- Melakukan *reviu* dan revisi Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Mengusulkan hasil *reviu* dan revisi untuk diterbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia.

Penanggung jawab:

Para Direktur

3. Setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan petunjuk teknis Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, ternyata sebagian besar Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri belum melaksanakan petunjuk teknis dimaksud dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Pemecahan Masalah:

Agar Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melaksanakan petunjuk teknis sebagaimana Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas secara efektif (menyeluruh dan berkesinambungan) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, maka perlu dilakukan *reviu* dan mengusulkan untuk dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia.

Rekomendasi:

Melakukan *reviu* terhadap petunjuk teknis Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei

2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas untuk diusulkan dan disusun dalam bentuk Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia.

Penanggung jawab:

Para Direktur

4. Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahap Penyidikan dan Pra Penuntutan; perkara Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, perkara Tindak Pidana Kepabeanaan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahap Pra Penuntutan perlu menerapkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, untuk mengoptimalkan pengungkapan pihak yang menerima manfaat dari suatu perkara Tindak Pidana Khusus.

Pemecahan Masalah:

Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sehingga tidak hanya menjerat pada pelaku lapangan, melainkan juga dapat mengungkap terhadap pihak yang mendapatkan keuntungan atau menerima manfaat dari suatu perkara Tindak Pidana Khusus.

Rekomendasi:

Menerbitkan petunjuk untuk penerapan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahap Penyidikan dan Pra Penuntutan; perkara Tindak Pidana Perpajakan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang, perkara Tindak Pidana Kepabeanaan, Cukai dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahap Pra Penuntutan.

Penanggungjawab:

- Direktur Penyidikan
- Direktur Penuntutan

5. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019, hendaknya bidang Tindak Pidana Khusus mencermati dengan saksama kemungkinan adanya Calon Anggota Legislatif yang terindikasi terlibat perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pemecahan Masalah:

Sebelumnya telah dikeluarkan Petunjuk Teknis yaitu:

- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-217/F/Fd.1/02/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 perihal Penanganan Tindak Pidana Korupsi saat Pemilihan Umum;
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-830/F/Fd.1/04/2009 tanggal 24 April 2009 perihal Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Pemilihan Umum; dan
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-103/F/Fd.1/01/2018 tanggal 19 Januari 2018 perihal Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Menjelang Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan merujuk pada ketentuan Petunjuk Teknis yang telah diterbitkan, maka untuk mempertegas, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis baru khusus penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam penanganannya diduga melibatkan kontestan Pemilihan Umum Legislatif, Penyelenggara Pemilihan Umum maupun salah satu pasangan Pemilihan Umum Presiden, agar ditunda penanganannya sampai dengan seluruh tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Legislatif telah dilaksanakan.

Rekomendasi:

Menerbitkan Petunjuk Teknis berkaitan dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terindikasi dilakukan oleh Calon Legislatif maupun Penyelenggara Pemilu baik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Legislatif.

Penanggungjawab:

- Direktur Penyidikan
 - Direktur Penuntutan
6. Untuk menghindari adanya tunggakan penanganan perkara yang tersangkanya melarikan diri atau tidak dapat ditemukan, maka dipandang penting adanya suatu petunjuk teknis tentang penanganan

perkara *in absentia* untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keseragaman dalam penanganan perkaranya.

Pemecahan Masalah:

Untuk menyelesaikan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah memperoleh bukti permulaan yang cukup, namun Tersangka dan/atau Terdakwanya melarikan diri, perlu melakukan evaluasi dan/atau *reviu* terhadap Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1742/F/Fd.1/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal: Tata Cara Penetapan dan Penyelesaian perkara yang tersangka, terdakwa dan terpidana berstatus Daftar Pencarian Orang, untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keseragaman dalam penanganan perkaranya.

Rekomendasi:

- Melakukan evaluasi dan/atau *reviu* terhadap Petunjuk Teknis terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah memperoleh bukti permulaan yang cukup, namun Tersangka dan Terdakwanya melarikan diri agar tetap dilimpahkan untuk diperiksa dan disidangkan secara *in absentia* sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1742/F/Fd.1/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal: Tata Cara Penetapan dan Penyelesaian perkara yang tersangka, terdakwa dan terpidana berstatus Daftar Pencarian Orang dengan memaksimalkan pelacakan aset/penyelamatan aset.
- Menerbitkan petunjuk teknis sebagai hasil evaluasi dan *reviu*.

Penanggung jawab:

Para Direktur

7. Bidang Tindak Pidana Khusus dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang belum pernah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Pemecahan Masalah:

Dalam Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Tersangka yang melarikan diri Daftar

Pencarian Orang dan harta kekayaannya telah teridentifikasi, Penyidik perlu mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai upaya mengoptimalkan penyelamatan aset.

Rekomendasi:

Menerbitkan Petunjuk Teknis berkaitan dengan tata cara pengajuan permohonan penanganan harta kekayaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai upaya mengoptimalkan penyelamatan aset sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Penanggung jawab:

Direktur Penyidikan

8. Agar bidang Tindak Pidana Khusus mengembangkan sistem penyimpanan data dan pelaporan penanganan perkara berbasis teknologi informasi, sehingga dapat mempermudah pemantauan kinerja sekaligus mempercepat proses penanganan perkara Tindak Pidana Khusus.

Pemecahan Masalah:

Perlu dibuat aplikasi sistem penanganan perkara berbasis Informasi dan Teknologi pada seluruh Satuan Kerja Tindak Pidana Khusus dengan mengacu pada *Standar Operasional Prosedur* dan Petunjuk Teknis penanganan perkara Tindak Pidana Khusus dengan *output* berupa perkembangan dan laporan capaian kinerja.

Rekomendasi:

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan kepada seluruh Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus di Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri menerapkan dan mengimplementasikan aplikasi *Case Management System* dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, berkoordinasi dengan Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Penanggung jawab:

- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
- Kepala Kejaksaan Tinggi
- Kepala Kejaksaan Negeri
- Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

9. Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi saat ini masih menitikberatkan pada subyek pelaku dan penyelamatan kerugian keuangan negara, tetapi belum melihat pada akibat lainnya yang ditimbulkan

Pemecahan Masalah:

Bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi juga harus melihat terhadap dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan koruptif sehingga penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi juga harus melihat pada dampak tidak tercapainya secara optimal program prioritas strategis nasional yang menjadi unggulan pemerintah.

Rekomendasi:

Menerbitkan Petunjuk Teknis dalam penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara tetapi berdampak pada tidak tercapainya secara optimal program prioritas strategis nasional yang menjadi unggulan pemerintah.

Penanggung jawab:

Para Direktur

10. Petunjuk Teknis sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-146/F/Fu.1/01/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal: Peningkatan Kualitas dan Strategi Eksekusi/Pelaksanaan Putusan, belum dilaksanakan secara maksimal, dalam hal ini masih terdapat temuan Badan Pemeriksaan Keuangan terkait dengan Barang Rampasan/Barang Sitaan yang belum tuntas di eksekusi.

Pemecahan Masalah:

Agar eksekusi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tuntas, maka Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-146/F/Fu.1/01/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal: Peningkatan Kualitas dan Strategi Eksekusi/Pelaksanaan Putusan, perlu

ditingkatkan menjadi Peraturan Jaksa Agung RI atau Surat Edaran Jaksa Agung RI.

Rekomendasi:

Melakukan *reviu* terhadap petunjuk teknis Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-146/F/Fu.1/01/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal: Peningkatan Kualitas dan Strategi Eksekusi/Pelaksanaan Putusan untuk diusulkan dan disusun dalam bentuk Surat Edaran Jaksa Agung RI.

Penanggungjawab:

Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi

E. REKOMENDASI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi E, telah diinventarisir beberapa pokok permasalahan, pemecahan masalah dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Adanya penambahan struktur dan perubahan nomenklatur organisasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah.

Pemecahan Masalah:

Mengubah proses bisnis (administrasi dan teknis) kegiatan pelaksanaan fungsi Datun.

Rekomendasi:

- Melakukan revisi Peraturan Jaks Agung Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP 157/A/JA/11/2012 yang mengatur tentang tupoksi dan administrasi Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Melakukan revisi Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan menambah Standar Operasional Prosedur Teknis/*Standard Operating Guideline* Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Mendorong dan mengusulkan Perja tentang kode surat bagi struktur Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang baru baik di pusat maupun daerah.

Penanggungjawab:

- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
- Jaksa Agung Muda Pembinaan

2. Belum adanya sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan.

Pemecahan Masalah:

Merumuskan Petunjuk Teknis yang mengatur hubungan antar bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Tindak Pidana Khusus & dan Bidang Intelijen secara umum dan pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan secara khusus.

Rekomendasi:

Mengakselerasi dan Menyelesaikan Penyusunan Juknis bersama antar bidang.

Penanggungjawab:

- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
- Jaksa Agung Muda Intelijen
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
- Jaksa Agung Muda Pembinaan
- Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

3. Kendala dalam implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-020/A/JA/07/2017 tentang penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti eks UU 3/1971.

Pemecahan Masalah:

Optimalisasi Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti.

Rekomendasi:

Mengakselerasi dan menyelesaikan revisi Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-020/A/JA/07/2017 tentang Petunjuk Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanggungjawab:

- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
- Jaksa Agung Muda Pengawasan
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
- Jaksa Agung Muda Pembinaan

4. Belum optimalnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam mengantisipasi perkembangan proses bisnis berbasis Teknologi Informasi.

Pemecahan Masalah:

Perlu diadakannya perangkat dan sumber daya manusia.

Rekomendasi:

- Mendorong digitalisasi proses administrasi dan pengendalian perkara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Mengadakan pelatihan dengan instansi dan lembaga terkait dengan kegiatan ekonomi dan sosial yang berbasis digital.
- Mengirimkan sumber daya manusia untuk mengikuti diklat teknis dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri.
- Melakukan kerjasama dengan lembaga/ perusahaan untuk dapat memberikan beasiswa kepada para Jaksa Pengacara Negara.
- Menganggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (revisi).

Penanggungjawab:

- Jaksa Agung Muda Pembinaan
- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

5. Belum optimalnya Pelaksanaan Penegakan Hukum.

Pemecahan Masalah:

Penguatan fungsi Penegakan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Rekomendasi:

Menyusun Juknis dalam pelaksanaan fungsi Penegakan Hukum.

Penanggungjawab:

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

6. Meningkatnya permasalahan perdata yang penyelesaiannya melalui forum arbitrase baik di dalam maupun luar negeri.

Pemecahan Masalah:

Meningkatkan kapasitas Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara arbitrase.

Rekomendasi:

- Mengadakan *in house training* dan pelatihan bersama penanganan perkara arbitrase.

- Menyusun Petunjuk Teknis / Standar Operasional Prosedur penanganan perkara arbitrase.

Penanggungjawab:

- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
- Jaksa Agung Muda Pembinaan
- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Kepala Kejaksaan Tinggi

F. REKOMENDASI BIDANG PENGAWASAN

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi F, telah diinventarisir beberapa pokok permasalahan, pemecahan masalah dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengawasan fungsional masih berorientasi pada temuan dan penjatuhan hukuman (*watchdog*), belum dapat menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan fungsi pencegahan penyimpangan (*early warning system*).

Pemecahan Masalah:

Perlu disusun pedoman teknis tentang peran Bidang Pengawasan dari *watchdog* menjadi *consultant* dan *catalyst*

Rekomendasi:

Menyusun pedoman teknis tentang peran Bidang Pengawasan dari *watchdog* menjadi *consultant* dan *catalyst*

Penanggungjawab:

- Jaksa Agung Muda Pengawasan
- Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- Inspektur

2. Dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat sasaran program terkait penerapan SPIP yang menjadi tanggung jawab Bidang Pengawasan, namun sesuai Pasal 6 Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-255/A/JA/12/2011, Bidang Pengawasan hanya bertugas melaksanakan pengawasan intern.

Pemecahan Masalah:

Perlu diusulkan perubahan Indikator Kinerja Utama Bidang Pengawasan yang menitikberatkan pada peran Bidang Pengawasan

selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Pengawasan Fungsional sebagai *quality assurance*.

Rekomendasi:

Mengusulkan perubahan Indikator Kinerja Utama Bidang Pengawasan yang menitikberatkan peran Bidang Pengawasan selaku APIP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Pengawasan Fungsional sebagai *quality assurance*.

Penanggungjawab:

- Jaksa Agung Muda Pengawasan
- Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- Inspektur

3. Inspektorat Keuangan belum memiliki pedoman teknis dalam melaksanakan tugas selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pemecahan Masalah:

Perlu disusun pedoman teknis mengenai pelaksanaan tugas Inspektorat Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kejaksaan Republik Indonesia.

Rekomendasi:

Menyusun pedoman teknis pelaksanaan tugas Inspektorat Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kejaksaan Republik Indonesia.

Penanggungjawab:

- Jaksa Agung Muda Pengawasan
- Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- Inspektur Keuangan

4. Masih minimnya tenaga fungsional Auditor dan kompetensi Pejabat Pengawasan Fungsional dan Fungsional Auditor untuk melaksanakan tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pemecahan Masalah:

Perlu penambahan tenaga fungsional Auditor dan dilakukan diklat/pelatihan/*in house training/Focus Group Discussion* pengembangan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kejaksaan Republik Indonesia.

Rekomendasi:

Diadakan penambahan tenaga fungsional auditor dan diselenggarakan diklat/pelatihan/*in house training/ Focus Group Discussion* untuk pengembangan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kejaksaan Republik Indonesia.

Penanggungjawab:

- Jaksa Agung Muda Pengawasan
- Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- Inspektur Keuangan

5. Belum adanya panduan dalam implementasi *Whistleblowing System* di Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemecahan Masalah:

Perlu disusun Buku Panduan Pelaksanaan *Whistleblowing System* di Kejaksaan Republik Indonesia

Rekomendasi:

Disusun Buku Panduan Pelaksanaan *Whistleblowing System* di Kejaksaan Republik Indonesia.

Penanggungjawab:

- Jaksa Agung Muda Pengawasan
- Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- Inspektur

6. Unit Perlindungan Pelapor belum dibentuk di tingkat Kejaksaan Tinggi.

Pemecahan Masalah:

Perlu disusun Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor Tingkat Kejaksaan Tinggi.

Rekomendasi:

Disusun Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor Tingkat Kejaksaan Tinggi.

Penanggungjawab:

- Jaksa Agung Muda Pengawasan
- Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- Inspektur

7. Masih minimnya kompetensi Pejabat Pengawasan Fungsional dalam melaksanakan Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pemecahan Masalah:

Perlu dilakukan diklat/pelatihan/*in house training*/*Focus Group Discussion* berkaitan Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Rekomendasi:

Diselenggarakan diklat/pelatihan/*in house training*/*Focus Group Discussion* berkaitan Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Penanggungjawab:

- Jaksa Agung Muda Pengawasan
- Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- Inspektur

G. REKOMENDASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Komisi G, telah diinventarisir beberapa pokok permasalahan, pemecahan masalah dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Belum ada standarisasi tenaga pengajar dan penyelenggara Diklat serta penyesuaian kurikulum dan standar diklat berbasis kompetensi dalam rangka merespon berbagai tantangan dalam penegakan hukum di tengah perkembangan teknologi digital.

Pemecahan Masalah:

- Dilakukan evaluasi dan kajian terhadap kurikulum dan bahan ajar yang sudah ada disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dan analisa kebutuhan diklat.
- Agar disiapkan rancangan peraturan standar kompetensi/widyaiswara.

Rekomendasi:

- Agar evaluasi dan kajian dilakukan dengan optimal sehingga dapat mewujudkan diklat yang tepat sasaran, tepat isi kurikulum dan tepat strategi untuk mencapai tujuan.

- Terbitnya Peraturan Jaksa Agung tentang standar kompetensi/widyaiswara.
- Supaya diusulkan para pegawai sebagai Widyaiswara dan pegawai yang memenuhi standar kompetensi sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara, yang Juga mempunyai kemampuan dalam bidang Informasi dan Teknologi.

Penanggungjawab:

- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Jaksa Agung Muda Pembinaan

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan (Widyaiswara) yang memiliki kompetensi yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan kegiatan Kediklatan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara.

Pemecahan Masalah:

Dibutuhkan penambahan pegawai sebagai Widyaiswara dan pegawai yang memenuhi standar kompetensi sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Rekomendasi:

Supaya mengikutsertakan para pejabat struktural dan jaksa fungsional /pegawai tata usaha yang berkompeten dalam Diklat *Training of Fasilitator* dan *Training of Trainer*.

Penanggungjawab:

Badan Pendidikan dan Pelatihan

3. Belum adanya dasar hukum atas pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam penggunaan fasilitas-fasilitas milik Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia oleh pihak ketiga.

Pemecahan Masalah:

Segera dibuat usulan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dikoordinasikan dengan Biro Keuangan pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan.

Rekomendasi:

Agar dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Biro Keuangan Kejaksaan Agung dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan dalam rangka penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait penggunaan fasilitas-fasilitas milik Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia oleh pihak ketiga.

Penanggungjawab:

- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Jaksa Agung Muda Pembinaan

4. Sistem aplikasi *e-Office* yang sudah ada, belum didukung oleh-Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan di Bidang Informasi dan Teknologi pada masing-masing Bidang, sehingga akan menghambat peningkatan pelayanan publik.

Pemecahan Masalah:

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Badan-Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, baik kualitas dalam peningkatan pelayanan publik, maupun keahlian di bidang Informasi dan Teknologi.

Rekomendasi:

Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan pelatihan bagi pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan khususnya operator komputer, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang Informasi dan Teknologi.

Penanggungjawab:

- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Jaksa Agung Muda Pembinaan

5. Belum optimalnya koordinasi pihak-pihak terkait (Badan Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Pembinaan dan 6 sentra Pendidikan dan Pelatihan) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sentra Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 689).

Pemecahan Masalah:

Terkait dengan penyusunan program kegiatan di sentra Pendidikan dan Pelatihan khususnya dalam penyusunan kurikulum, bahan ajar/modul, dan penentuan tenaga pengajar dalam rangka pengendalian sentra Pendidikan dan Pelatihan, agar masing-masing sentra melaporkan dan koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Rekomendasi:

Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan Bidang Pembinaan dan 6 sentra Pendidikan dan Pelatihan yaitu : Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Penanggungjawab:

- Badan Pendidikan dan Pelatihan
 - Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
6. Belum optimalnya kerja sama dengan pihak ketiga yang melibatkan Kementerian/Lembaga lain di dalam dan di luar negeri untuk mendapatkan tambahan wawasan, keilmuan, praktek, tukar menukar pengalaman, penguasaan Bahasa asing dan *networking*.

Pemecahan Masalah:

Agar Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang mempunyai keselarasan dengan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Ke depan agar diperluas kerjasama dengan luar negeri.

Rekomendasi:

Mengoptimalkan kerja sama yang intensif dengan pihak ketiga yang melibatkan Kementerian/Lembaga lain di dalam dan di luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terpadu.

Penanggungjawab:

- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Jaksa Agung Muda Pembinaan

7. Belum optimalnya pemanfaatan para pegawai berpendidikan Strata 2 dan Strata 3 khususnya penerima program beasiswa untuk berkontribusi dalam pengembangan dan penguatan institusi Kejaksaan.

Pemecahan Masalah:

Memerintahkan penerima beasiswa Strata 2 dan Strata 3 agar memberikan kontribusi untuk pengembangan dan penguatan institusi Kejaksaan.

Rekomendasi:

Membentuk Tim kerja untuk melakukan inventarisasi para penerima beasiswa Strata 2 dan Strata 3 serta memerintahkan agar memberikan kontribusi untuk peningkatan dan perbaikan Kejaksaan misalnya, berupa, kajian, jurnal, buku, dan lain-lain dikirimkan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Penanggungjawab:

- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

BAB IV

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2019

1. Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019

a. Pagu Indikatif 2019

Kejaksaan Republik Indonesia telah mengajukan usulan kebutuhan anggaran untuk tahun 2019 kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp.9.767.178.868.000,- (sembilan triliun tujuh ratus enam puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) melalui surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B- 002/A/Cr.2/01/2018 tanggal 05 Januari 2018 dan Nomor : B- 038/A/Cr.2/01/2018 tanggal 07 Maret 2018.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-269/MK.02/2018 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: B-209/M.PPN/D.8/KU.01.01/ 04/2018 tanggal 16 April 2018 hal Pagu Indikatif K/L Tahun 2019, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam Tahun Anggaran 2019 memperoleh Pagu Indikatif sebesar **Rp. 6.146.271.982.000,-** (enam triliun seratus empat puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang jika dibandingkan dengan Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan anggaran sebesar **Rp. 240.333.693.000,-** (dua ratus empat puluh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian jenis belanja sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu 2018	Pagu Indikatif 2019	Selisih (+/-)
1.	Belanja Operasional Pegawai	2.889.983.000.000	2.790.749.318.000	99.233.682.000
2.	Belanja Operasional Barang	737.219.645.000	688.657.018.000	48.562.627.000
3.	Belanja Barang Non Operasional	2.759.403.030.000	2.666.865.646.000	92.537.384.000
	Jumlah	6.386.605.675.000	6.146.271.982.000	240.333.693.000

b. Pagu Anggaran 2019

Pada Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2019 dan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2019 Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh Pagu yang sama yaitu sebesar **Rp. 6.146.271.982.000,-** (enam triliun seratus empat puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

c. Pagu Alokasi Anggaran 2019

Pagu Alokasi Anggaran terdiri dari :

- I. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-166/MK.02/ 2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam Tahun Anggaran 2019 memperoleh Pagu Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 6.346.271.982.000,-** (enam triliun tiga ratus empat puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdapat kenaikan sebesar **Rp. 200.000.000.000,-** (dua ratus milyar rupiah) jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan pada bulan Juli 2018.
 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp. 148.075.776.000,- (seratus empat puluh delapan milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 2. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang digunakan untuk kegiatan diklat Teknis Administrasi Kejaksaan dan Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
 3. Program Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Pertahanan Keamanan sebesar Rp. 21.924.224.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan kasus Intelijen (yang sudah termasuk Posko Bandara, Posko Kantor Pos dan Posko Pelabuhan), kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

dan kegiatan Pelacakan Aset di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

II. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-820/MK.02/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam Tahun Anggaran 2019 memperoleh tambahan Anggaran sebesar **Rp. 200.000.000.000,-** (dua ratus milyar rupiah) sehingga Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar **Rp. 6.346.271.982.000,-** (enam triliun tiga ratus empat puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Tambahan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan pada Program-Program yaitu :

1. Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum Bid. IPOLEKSOSBUD Hukum dan Pertahanan Keamanan sebesar **Rp. 21.924.224.000,-** (dua puluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Lid/Pam/Gal di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebesar **Rp. 7.806.544.000,-** (tujuh milyar delapan ratus enam juta lima ratus ribu empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. Kegiatan Pelacakan Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebesar **Rp. 8.033.000.000,-** (delapan milyar tiga puluh tiga juta rupiah);
 - c. Kegiatan Posko Bandara/Kantor Pos/Pelabuhan sebesar **Rp. 1.658.500.000,-** (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebesar **Rp. 4.426.180.000,-** (empat milyar empat ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia sebesar **Rp. 30.000.000.000,-** (tiga puluh milyar rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil untuk 890 (delapan ratus sembilan puluh) orang sebesar

Rp. 20.516.630.000,- (dua puluh milyar lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk 890 (delapan ratus sembilan puluh) orang sebesar **Rp. 9.483.370.000,-** (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia sebesar **Rp. 148.075.776.000,-** (seratus empat puluh delapan milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh enam ribu rupiah), yang terdiri dari:

a. Pengadaan Perangkat Operasi Intelijen sebesar **Rp. 74.037.888.000,-** (tujuh puluh empat milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

b. Pengadaan Infrastruktur dan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Data Kepegawaian Terpadu Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) sebesar **Rp. 47.806.365.000,-** (empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

c. Pengadaan Pembuatan Bahan Edukasi dan Sosialisasi Kegiatan Kejaksaan di Media Elektronik dan Luar Ruang sebesar **Rp. 26.231.523.000,-** (dua puluh enam milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Untuk sementara anggaran tambahan sebesar **Rp. 200.000.000.000,-** (dua ratus milyar rupiah) tersebut dilakukan pemblokiran dan baru akan dibuka setelah selesai di reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

III. Program/Kegiatan Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia pada Tahun 2019

Rincian Proyek Prioritas Nasional Pagu Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, antara lain adalah:

No	Program/Kegiatan/Proyek	Target Dan Satuan	Pagu
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik Indonesia		125.367.730.000
	1. Implementasi Aplikasi CMS untuk mendukung <i>Pilot Project</i> SPPT	325 satker	120.367.730.000

	berbasis Teknologi Informasi		
	2. Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Kejahatan	15 laporan	5.000.000.000
II	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan		7.139.906.000
	1. Pendidikan dan Pelatihan penanganan Anak Berhadapan Hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak	8 angkatan	3.017.900.000
	2. Diklat <i>Illegal Fishing</i>	4 angkatan	1.374.002.000
	3. Diklat Mineral Batubara	4 angkatan	1.374.002.000
	4. Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan	4 angkatan	1.374.002.000
III	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam		30.348.800.000
	1. Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat	40 kegiatan	3.048.800.000
	2. Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	3.500 kegiatan	27.300.000.000
IV	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum		350.000.000
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1 rekomendasi	350.000.000
	JUMLAH		163.206.436.000

Rincian Prioritas Bidang Pagu Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019

No	Program/Kegiatan/Proyek	Target Dan Satuan	Pagu
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik Indonesia		125.367.730.000
	1. Implementasi Aplikasi CMS untuk mendukung <i>Pilot Project</i> SPPT berbasis Teknologi Informasi	325 satker	120.367.730.000
	2. Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Kejahatan	15 laporan	5.000.000.000
II	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik		18.090.950.000

	Indonesia		
	1. Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah I	36 laporan pengaduan	122.400.000
	2. Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah I	12 laporan pengaduan	87.600.000
	3. Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah II	36 laporan pengaduan	122.400.000
	4. Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah II	12 laporan pengaduan	87.600.000
	5. Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah III	36 laporan pengaduan	122.400.000
	6. Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah III	12 laporan pengaduan	87.600.000
	7. Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah IV	36 laporan pengaduan	122.400.000
	8. Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah IV	12 laporan pengaduan	87.600.000
	9. Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah V	36 laporan pengaduan	122.400.000
	10. Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah V	12 laporan pengaduan	87.600.000
	11. Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	1.156 laporan pengaduan	3.000.000.000
	12. Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	292 laporan pengaduan	4.000.000.000
	13. Pelaksanaan Inspeksi	335 Kegiatan	10.000.000.000
	14. Inspeksi khusus yang dilaksanakan pada Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia	20 Kegiatan	40.950.000
III	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan		8.859.408.000

	1. Pendidikan dan Pelatihan penanganan Anak Berhadapan Hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	8 angkatan	3.017.900.000
	2. Pendidikan dan Pelatihan <i>Illegal Fishing</i>	4 angkatan	1.374.002.000
	3. Pendidikan dan Pelatihan Mineral Batubara	4 angkatan	1.374.002.000
	4. Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran Hutan dan Lahan	4 angkatan	1.374.002.000
	5. Pendidikan dan Pelatihan Auditor	5 Angkatan	1.719.502.000
IV	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam		30.348.800.000
	1. Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat	40 kegiatan	3.048.800.000
	2. Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	3.500 kegiatan	27.300.000.000
V	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum		359.793.616.000
	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1 rekomendasi	350.000.000
	2. Penanganan Perkara terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan di Kejaksaan Agung	106 perkara	318.000.000
	3. Penanganan Perkara terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung	117 perkara	351.000.000
	4. Penanganan Perkara terhadap Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara	72 perkara	360.000.000
	5. Penanganan Perkara terhadap Narkotika dan Zat Adiktif lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung	444 perkara	1.332.000.000
	6. Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	67.888 perkara	35.514.000.000

	7. Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	61.230 perkara	259.720.196.000
	8. Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Upaya Hukum dan pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	61.230 perkara	18.873.770.000
	9. Perkara Pidana Umum Tertentu Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	67.888 perkara	2.674.250.000
	10. Perkara Pidana Umum Tertentu Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	61.230 perkara	35.120.400.000
	11. Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Upaya Hukum dan pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	61.230 perkara	5.180.000.000

Rincian anggaran yang dapat disusun Per Program berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2019 yaitu:

1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 3.698.839.140.000,- (tiga triliun enam ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah). Pada Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan program-program lain dikarenakan seluruh belanja pegawai satker pusat dan daerah dan belanja barang operasional (kecuali pada satker Badan Pendidikan dan Pelatihan) kegiatan-kegiatan tersebut berada pada program ini.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.760.379.418.000,- (dua triliun tujuh ratus enam puluh milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang sudah termasuk tunjangan fungsional Jaksa dan tunjangan kinerja pegawai

Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 95.233.682.000,- (sembilan puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) jika dibandingkan dengan Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

2. Belanja barang operasional untuk kebutuhan satker pusat dan daerah sebesar Rp. 709.104.813.000,- (tujuh ratus sembilan milyar seratus empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) antara lain untuk kebutuhan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, langganan daya dan jasa, honorarium pramubhakti dan satpam, honorarium pengelola keuangan, perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, biaya mutasi, seragam pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran.
3. Kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerja Sama Hukum dan biaya operasional perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di luar negeri dengan volume output 1 (satu) laporan dan 1 (satu) layanan.
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan Indikator Kinerja Program Prioritas dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu jumlah laporan terkait pola perubahan rekrutmen, mutasi dan promosi, serta reward dan punishment dengan volume output sebanyak 1 (satu) layanan.
5. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan Republik Indonesia dengan output 1 (satu) layanan.
6. Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian dengan masing-masing volume output 1 (satu) layanan.
7. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan Republik Indonesia dimana pada kegiatan ini melayani kebutuhan perlengkapan kantor untuk satuan kerja Kejaksaan Agung dengan volume output 1 (satu) layanan.
8. Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan Republik Indonesia, Pimpinan, Kerumahtanggaan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai dimana pada kegiatan ini melayani pemeliharaan untuk

satuan kerja Kejaksaan Agung dengan volume output 1 (satu) layanan.

9. Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dengan volume output 325 (tiga ratus dua puluh lima) Satuan Kerja. Pada kegiatan ini terdapat Kegiatan Program Prioritas Nasional yaitu Implementasi Aplikasi CMS untuk mendukung *Pilot Project* SPPT berbasis Teknologi Informasi yang akan dilaksanakan di 325 Satuan Kerja sebesar Rp. 120.367.730.000,- (seratus dua puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
10. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) penelitian.
11. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dimana pada kegiatan ini terdapat seluruh biaya pemeliharaan, langganan daya dan jasa, perjalanan dinas, kebutuhan sehari-hari perkantoran dan biaya lelang barang rampasan dis etiap Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan volume output 1 (satu) layanan.
12. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait perkara, dengan volume output 15 (lima belas) laporan. Pada kegiatan ini terdapat Kegiatan Program Prioritas Nasional yaitu Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Kejahatan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 1.764.872.381.000,- (satu triliun tujuh ratus enam puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019 yaitu pengadaan sarana dan prasarana dipusat dan daerah yang akan digunakan antara lain untuk:

1. Pengadaan Sistem *Monitoring* dan *Analisa Cyber*;
2. Pengadaan perangkat *Analisa Digital Cyber* dan Persandian;
3. Pengadaan Peralatan *Counter Surveillance* Tahap III;
4. Pengadaan Sistem Jaringan Komunikasi untuk keselamatan aparat Kejaksaan Tahap II;

5. Pengadaan Sistem manajemen informasi Daftar Pencarian Orang;
6. Pengadaan Peralatan Pengoptimalan Kemampuan *Monitoring Center* Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Pengadaan Sistem Manajemen Informasi Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan;
8. Pengadaan Sistem Penilaian, Pelaporan dan Penyusunan Bidang Pengawasan;
9. Pembangunan Gedung Pusat Pemulihan Aset;
10. Rehabilitasi gedung kantor di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri termasuk untuk Satuan Kerja di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri Mamuju;
11. Pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) untuk Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
12. Pengadaan kendaraan dinas mobil tahanan Tahap II;
13. Peralatan *Interactive Communication Conference System*;
14. Peralatan *Ad Hoc Intercommunication Conference System*;
15. Pengadaan Sistem Manajemen Informasi Pelaksanaan dan Pengembangan Analisis Jabatan;
16. Pengadaan Sistem Pengelolaan Arsip;
17. Pengadaan Aplikasi *Aset Recovery Data System (ARSSYS)* Tahap II;
18. Pengadaan komputer, printer, laptop beserta *e-office*;
19. Perlengkapan Ruang Rapat di Kejaksaan Agung;
20. Pengadaan Genset untuk Satuan Kerja daerah;
21. Pengadaan Meubelair untuk Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri;
22. Pengadaan inventaris kantor Kejaksaan Agung;
23. Pengadaan Peralatan dan Sistem Pengawasan Substansi Buku;
24. Pengadaan Perangkat Operasi Intelijen;
25. Pengadaan Infrastruktur dan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Data Kepegawaian Terpadu Berbasis Kecerdasan Buatan (AI);
26. Pengadaan Pembuatan Bahan Edukasi dan Sosialisasi Kegiatan Kejaksaan di Media Elektronik dan Luar Ruang.

3) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan sebesar Rp. 31.882.486.000,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 1.256.678.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
- b. Kegiatan Tusi dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan volume adalah 1 (satu) layanan antara lain: inspeksi umum, pemantauan, inspeksi pimpinan, inspeksi kasus, inspeksi khusus, supervisi, *video conference* Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan jajaran pengawasan di daerah, pelaksanaan *Whistleblowing System*, pelaksanaan Zona Integritas.
- c. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta Perdata Dan Tata Usaha Negara berupa kegiatan Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi dengan volume output 36 (tiga puluh enam) Laporan Pengaduan pada masing-masing wilayah I sampai dengan wilayah V, dan Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus dengan volume output 12 (dua belas) Laporan Pengaduan pada masing-masing wilayah I sampai dengan wilayah V.
- d. Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia yang terdiri dari pelaksanaan Inspeksi Khusus untuk 15 (lima belas) kegiatan.
- e. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran pengawasan di daerah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah:

- Jumlah Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi sebanyak 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) laporan untuk seluruh Kejaksaan Tinggi dan Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) laporan untuk seluruh Kejaksaan Tinggi.
- Pelaksanaan Inspeksi Umum pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) kegiatan.

4) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Alokasi untuk pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 114.232.744.000,- (seratus empat belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Kegiatan Tusi Dukungan Manajemen Tugas Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan indikator yang akan dicapai adalah:
 - Tersusunnya rencana program kerja, sarana dan prasarana, anggaran, pengembangan dan kerjasama, serta pengelolaan data, laporan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan standarisasi pendidikan dan pelatihan, terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi, dengan volume output 1 (satu) layanan dengan rincian yaitu:
 1. Belanja pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 30.369.900.000,- (tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) jika dibandingkan dengan Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
 2. Belanja barang operasional sebesar Rp. 22.638.963.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan

dan mesin, langganan daya dan jasa, honorarium pramubhakti, honorarium pengelola keuangan dan kebutuhan sehari-hari perkantoran.

- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang masuk kedalam Proyek Prioritas Nasional yaitu :
 - 1. Pendidikan dan pelatihan penanganan Anak Berhadapan Hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 8 (delapan) angkatan;
 - 2. Pendidikan dan pelatihan *Illegal Fishing* sebanyak 4 (empat) angkatan;
 - 3. Pendidikan dan pelatihan Mineral Batubara sebanyak 4 (empat) angkatan;
 - 4. Pendidikan dan pelatihan Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 4 (empat) angkatan.
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang tidak termasuk Prioritas Nasional antara lain Pendidikan dan pelatihan Auditor, Pendidikan dan pelatihan Pemilu, Pendidikan dan pelatihan Perselisihan Hasil Pemilu, Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Pendidikan dan pelatihan Teknologi Informasi dan Komputer, Pendidikan dan pelatihan Bendahara, Pendidikan dan pelatihan Kehumasan, Pendidikan dan pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan dan Latsar untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan dan pelatihan terpadu Jaksa, Oditur Militer dan Jaksa Thailand, Pendidikan dan pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan serta beasiswa Program S2 dan S3.
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia

5) Program Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 100.860.586.000,- (seratus milyar delapan ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 1.739.324.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin

- operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
- b. Kegiatan Tusi dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dengan volume adalah 1 (satu) layanan;
- c. Kegiatan Tusi Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dan Keuangan dengan indikator kegiatan yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah :
- Laporan Hasil Kegiatan Ekonomi dan Keuangan sebanyak 35 (tiga puluh lima) Laporan
 - Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Asset terkait Tindak Pidana sebanyak 65 (enam puluh lima) Laporan.
 - Laporan Hasil Operasi bidang Ekonomi dan Keuangan sebanyak 70 (tujuh puluh) Laporan.
- d. Kegiatan Tusi Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah :
- Laporan Hasil Kegiatan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen sebanyak 60 (enam puluh) Laporan.
 - Laporan Hasil Kegiatan *Monitoring Center* untuk 12 (dua belas) Laporan.
 - Laporan Hasil Kegiatan Monitoring Signal sebanyak 62 (enam puluh dua) Laporan.
 - Laporan Hasil Kegiatan Digital Forensik sebanyak 5 (lima) Laporan.
 - Laporan Hasil Kegiatan Tactical Pasif sebanyak 10 (sepuluh) Laporan.
 - Laporan Hasil Kegiatan Operasional Kontra Penginderaan dan *Scanning* sebanyak 16 (enam belas) Laporan.
 - Laporan Hasil Kegiatan Adhyaksa *Command Center* sebanyak 12 (dua belas) Bulan Layanan.
- e. Kegiatan Tusi Pelaksanaan Kegiatan Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah:
- Laporan Hasil Kegiatan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan sebanyak 45 (empat puluh lima) Laporan.

- Laporan Hasil Kegiatan Rencana Aksi sebanyak 8 (delapan) Kegiatan;
- f. Kegiatan Tusi Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Pembangunan Strategis dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah:
 - Laporan Hasil Kegiatan Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat sebanyak 40 (empat puluh) Laporan.
 - Dukungan Kegiatan Pengamanan dan Pembangunan Strategis sebanyak 5 (lima) Laporan;
- g. Kegiatan Tusi Pelaksanaan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah:
 - Laporan Hasil Kegiatan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan sebanyak 43 (empat puluh tiga) Laporan.
 - Laporan Hasil Kegiatan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama sebanyak 30 (tiga puluh) Laporan.
 - Laporan Hasil Kegiatan Posko Intelijen sebanyak 48 (empat puluh delapan) Laporan.
- h. Kegiatan Tusi Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 1.014 (seribu empat belas) Laporan yang termasuk di dalam Posko Bandara, Posko Kantor Pos dan Posko Pelabuhan.
 - Kegiatan Pelacakan Aset terkait tindak pidana di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang kejaksaan Negeri sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) kegiatan.
- i. Kegiatan Tusi Penerangan Dan Penyuluhan Hukum dengan indikator kegiatan yang akan dicapai adalah :
 - Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan Dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana pada 523 (lima ratus dua puluh tiga) Satuan Kerja dengan rincian kegiatan:

- Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Agung sebanyak 16 (enam belas) Kegiatan;
- Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 585 (lima ratus delapan puluh lima) Kegiatan;
- Kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang kejaksaan Negeri sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kegiatan yang merupakan kegiatan Proyek Prioritas Nasional.
- Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang kejaksaan Negeri sebanyak 1.443 (seribu empat ratus empat puluh tiga) Kegiatan.
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang kejaksaan Negeri sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) Kegiatan.

6) Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum adalah Rp. 385.717.451.000,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 1.187.481.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- b. Kegiatan Tusi dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan volume adalah 1 (satu) layanan;
- c. Kegiatan Eksekusi Terpidana Mati sebanyak 12 (dua belas) orang terpidana.
- d. Penanganan Perkara terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan di Kejaksaan Agung dengan

indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 106 (seratus enam) perkara;

- e. Penanganan Perkara terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) perkara;
- f. Penanganan Perkara terhadap Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara;
- g. Penanganan Perkara terhadap Narkotika dan Zat Adiktif lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) perkara;
- h. Kegiatan Tusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Satuan Kerja yang dapat dibiayai di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yaitu:
 - 67.888 (enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan) perkara ditingkat Pra Penuntutan dan 61.230 (enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh) perkara di tingkat Penuntutan dan Eksekusi. Dengan volume target tersebut, telah tersedia kegiatan pengiriman terdakwa dan Barang Bukti (tahap II) dari Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri ke Lembaga Pemasyarakatan dan biaya antar jemput terdakwa untuk disidangkan ke Pengadilan serta transport lokal sidang Jaksa untuk 1 (satu) tahun.
- i. Kegiatan Tusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu yang diperuntukkan untuk penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan (*illegal fishing*) /perkara Kehutanan yang memerlukan biaya tinggi, yang dapat dibiayai di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah 360 (tiga ratus enam puluh) perkara di tingkat Pra Penuntutan dan 259 (dua ratus lima puluh sembilan) perkara di tingkat Penuntutan dan Eksekusi.

7) Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 229.764.612.000,- (dua ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 1.497.416.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- b. Kegiatan Layanan Perkantoran dengan satuan kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah 1 (satu) layanan;
- c. Kegiatan Tusi Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Agung dengan indikator yang akan dicapai adalah :
 - Jumlah Kegiatan Penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara.
 - Jumlah Kegiatan Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara.
 - Jumlah Kegiatan Penyelidikan perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya di selesaikan sebanyak 5 (lima) perkara.
 - Jumlah Kegiatan Penyidikan perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya di selesaikan sebanyak 10 (sepuluh) perkara.
 - Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Bukti dan Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi dan perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya di selesaikan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara.
- d. Kegiatan Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Agung dengan indikator yang akan dicapai adalah :

- Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 80 (delapan puluh) perkara.
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 50 (lima puluh) perkara.
- e. Kegiatan Penanganan Pra Penyidikan, Penyidikan, Pra Penuntutan dan Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Kejaksaan Agung dengan indikator yang akan dicapai adalah 1 (satu) perkara.
- f. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang merupakan dengan indikator yang akan dicapai sebagai berikut:
 - Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 523 (lima ratus dua puluh tiga) perkara.
 - Jumlah Pra Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) perkara.
 - Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) perkara.
 - Jumlah Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara.
 - Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) perkara.
 - Jumlah Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya terdakwa tidak ditahan di dalam Rumah Tahanan sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara.
 - Jumlah Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya yang terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) perkara.

- Jumlah kegiatan Eksaminasi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara.

8) Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 17.602.582.000,- (tujuh belas milyar enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Kegiatan Tusi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan indikator kinerja yang akan dicapai sebanyak 1 (satu) layanan.
- b. Kegiatan Tusi Pertimbangan Hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dengan indikator perkara perdata yang diselesaikan di Kejaksaan Agung sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) perkara.
- c. Kegiatan Tusi Penanganan Perkara Perdata yang diselesaikan di Kejaksaan Agung sebanyak 110 (seratus sepuluh puluh) perkara.
- d. Kegiatan Tusi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Agung sebanyak 80 (delapan puluh) perkara.
- e. Kegiatan Tusi Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan indikator terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah, baik di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yaitu :
 - Terselesaikannya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi sebanyak 102 (seratus dua) perkara.
 - Terselesaikannya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi sebanyak 1.473 (seribu empat ratus tujuh puluh tiga) perkara.
 - Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejati dan Kejari dengan dengan volume output 460 (empat ratus enam puluh) satker.

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2019 ini, maka diharapkan para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktur, Inspektur di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Atase Teknis Kejaksaan di luar negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 untuk masing-masing Bidang/Unit Kerjanya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang/Unit Kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing pejabat yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ini harus dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani kerangka Perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka Regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi *e-monev* Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *Reward* dari Kemeterian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan / Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini

diperlukan adanya komitmen bersama antara Pimpinan Satuan Kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing satuan Kerja, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia baik di Pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

TTD

H. M. PRASETYO

RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN DAN
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN 2019

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : “Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel”.

Misi :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	-	653.993.914.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1080	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kegiatan Kerja Sama Hukum Luar Negeri dan Ekstradisi/MLA Jumlah Penelaahan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Perpustakaan Kejaksaan Agung RI 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 	1 layanan	1.290.380.000	KARO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
				<ul style="list-style-type: none"> Layanan Hukum 	1 layanan	1.648.379.000	
1081	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari.		Laporan manajemen kepegawaian dan pembinaan pegawai	Layanan Manajemen SDM	1 layanan	24.244.608.000	KARO KEPEGAWAIAN
1082	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI		<ul style="list-style-type: none"> Layanan Perkantoran Laporan Pengelolaan Keuangan Laporan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan 	1 layanan	791.271.000	KARO KEUANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> Layanan Manajemen Keuangan 	1 layanan	11.671.805.000	
				<ul style="list-style-type: none"> Layanan Perkantoran 	1 layanan	305.737.398.000	
1083	Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi Dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terkait penyempurnaan organisasi dan tata kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Pengelolaan Data yang terkait dengan Penyusunan Rencana dan Program Kerja, Pengembangan Organisasi 	1 layanan	788.405.000	KARO PERENCANAAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kejaksaan RI • Laporan Pemantauan dan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja • Laporan Hasil Pengelolaan Data yang terkait dengan Penyusunan Rencana dan Program Kerja, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana 	dan Tata Laksana			
				• Layanan Perencanaan	1 layanan	3.784.270.000	
				• Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 layanan	1.173.960.000	
				• Layanan Manajemen Organisasi	1 layanan	1.212.460.000	
				• Layanan Reformasi Birokrasi	1 layanan	963.700.000	
1084	Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI		<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pegawai Kejaksaan R.I. • Layanan Perkantoran • Operasional ULP dan LPSE 	• Layanan Manajemen BMN	1 layanan	5.059.071.000	KARO PERLENGKAPAN
				• Layanan Perkantoran	1 layanan	22.408.497.000	
1085	Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan RI, Pimpinan, Kerumahtangaan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Kesekretariatan, Keamanan, Protokoler, Bina Kesejahteraan Pegawai, dan Pimpinan • Layanan Perkantoran 	• Layanan Umum	1 layanan	6.106.581.000	KARO UMUM
				• Layanan Perkantoran	1 layanan	55.474.564.000	
1088	Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi		Tersedianya Basis Data yang Dapat Menyajikan Informasi Data Perkara	• Implementasi Pilot Project SPPT Berbasis IT	325 satker	120.367.730.000	KAPUS DASKRIMTI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Secara Akurat, Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Penanganan Perkara Secara Cepat dan Akuntabel Serta Dapat Diakses Masyarakat	• Layanan Data dan Informasi	1 layanan	1.410.755.000	
				• Layanan Perkantoran	12 layanan	36.248.810.000	
1089	Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia		Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Kerjasama Keilmuan dan Kegiatan Ilmiah Lainnya.	Layanan Penelitian dan Pengembangan	1 layanan	1.971.250.000	KAPUS LITBANG
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari		Jumlah Pelayanan Kesekretariatan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	1.000.000.000	SESJAM PEMBINAAN
5276	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset Yang Terkait Perkara		Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Kejahatan	• Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang Terkait dengan Hasil Kejahatan	15 laporan	5.000.000.000	KEPALA PUSAT PEMULIHAN ASET
				• Pelayanan Ketatausahaan dan Birokrasi serta Penyusunan Rencana Program Kerja	1 layanan	739.020.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas, kendaraan operasional serta	-	-	1.622.095.471.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		Instansi Kejaksaan RI	sarana perlengkapan bangunan				
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 layanan	1.622.095.471.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

**RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
TAHUN 2019**

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : “Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel”.

Misi :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian MasalahPerdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan in kracht • Jumlah pengembalian kerugian 	-	-	25.634.835.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		<p>dan pencari keadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<p>keuangan negara melalui jalur pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kepuasan masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan 				
1109	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		Jumlah Kegiatan di Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Sesuai Peraturan yang Berlaku Khususnya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	• Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	21.736.354.000	SESJAM PIDUM
				• Layanan Perkantoran	1 layanan	1.187.481.000	
1105	Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda		Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung	117 perkara	351.000.000	DIREKTUR TINDAK PIDANA KAMNEGTIBUM, ORHADA DAN TPUL
1106	Penganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum		Jumlah perkara tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan dan Tahap Penuntutan	Perkara terorisme dan tindak pidana lintas negara	106 perkara	318.000.000	DIREKTUR TINDAK PIDANA KAMNEGTIBUM, ORHADA DAN TPUL
				Penyusunan SOP penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Rekomendasi	350.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1107	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya		Jumlah penanganan perkara tindak Pidana Umum Lainnya termasuk penanganan perkara kehutanan di tingkat penyidikan lanjutan	Penyidikan lanjutan Tindak Pidana Kehutanan	72 perkara	360.000.000	DIREKTUR TINDAK PIDANA KAMNEGTIBUM, ORHADA DAN TPUL
1121	Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya		Jumlah penanganan perkara tindak Pidana Umum Lainnya Terhadap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya	Perkara Tindak Pidana terhadap Narkotika dan Zat Adiktif lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung	444 perkara	1.332.000.000	DIREKTUR TINDAK PIDANA KAMNEGTIBUM, ORHADA DAN TPUL

RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2019

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : “Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel”.

- Misi** :
1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
 2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
 3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian MasalahPerdata dan Tata Usaha Negara;
 4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus • Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa • Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	27.399.472.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN			
1115	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus		Jumlah Pelayanan Kesekretariatan di Bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	• Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	6.088.331.000	SESJAM PIDSUS	
				• Layanan Perkantoran	1 layanan	1.497.416.000		
1110	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat.		Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Agung	65 perkara	3.137.875.000	DIREKTUR PENYIDIKAN	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam Tahap Penyidikan di Kejaksaan Agung	65 perkara	4.995.150.000		
				Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Penyidikan di Kejaksaan Agung	5 perkara	457.625.000		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Pelacakan Aset di Kejaksaan Agung	75 perkara	1.237.500.000		
			Jumlah Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan	Perkara Pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam Tahap Penyidikan di Kejaksaan Agung	3 perkara	446.650.000		
			Penanganan pra peradilan perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya/pelanggaran HAM yang Berat di Kejaksaan Agung	1 perkara	169.425.000			
			Perkara Tindak Pidana HAM Berat yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung	1 perkara	9.360.000			
			Perkara Tindak Pidana HAM Berat yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	1 perkara	49.740.000			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Eksekusi perkara pelanggaran HAM berat di Kejaksaan Agung	1 perkara	2.700.000	
				Eksaminasi Umum Perkara pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung	1 perkara	13.600.000	
				Eksekusi khusus perkara pelanggaran HAM berat di Kejaksaan Agung	1 perkara	11.150.000	
1111	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung.		Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	60 perkara	4.975.100.000	DIREKTUR PENUNTUTAN
			Jumlah Perkara Tindak Pidana khusus lainnya yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara Tindak Pidana Khusus yang Diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	50 perkara	3.350.850.000	
1113	Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi (Pidana Korupsi).		Jumlah Pengendalian Penggunaan Upaya hukum, Grasi dan Pelaksanaan Eksekusi dan Eksaminasi	Pelaksanaan eksaminasi umum perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya/pelanggaran HAM yang berat di Kejaksaan Agung	100 perkara	215.000.000	DIREKTUR EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
				Pelaksanaan eksaminasi khusus perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya/pelanggaran HAM yang berat di Kejaksaan Agung	30 perkara	742.000.000	

RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2019

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

Misi :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
06.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kepuasan masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan • Persentase kemenangan bidang DATUN Kejaksaan melalui jalur litigasi dan non litigasi • Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata 	-	-	9.091.981.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
1120	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara		Jumlah Kegiatan di Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Berkoordinasi dan Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	4.207.906.000	SESJAM DATUN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1116	Penanganan Pemulihan dan Perlindungan Hak.		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan Hak yang diselesaikan di Kejaksaan Agung Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan Hak yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi 	Pemulihan dan Perlindungan Hak Melalui Litigasi di Kejaksaan Agung	1 perkara	2.015.650.000	DIREKTUR PEMULIHAN DAN PERLINDUNGAN HAK
1117	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata		Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi	Perkara perdata yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	1 perkara	1.705.550.000	DIREKTUR PERDATA
1118	Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara		Jumlah perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan	Perkara tata usaha negara yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	1 perkara	1.162.875.000	DIREKTUR TATA USAHA NEGARA

RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN TAHUN 2019

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

Misi :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.06	Program Penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD hukum dan hankam	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara • Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	-	-	26.803.312.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN
1104	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan dibidang kesekretariatan dilingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 	1 layanan	5.255.667.000	SESJAM INTELIJEN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			peraturan yang berlaku	• layanan Perkantoran	1 layanan	1.739,324.000	
1099	Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan intelijen dibidang penyelamatan Keuangan Negara dan penanggulangan Tindak Pidana Laporan hasil Kegiatan Pelacakan Aset terkait Tindak Pidana Jumlah laporan hasil operasi intelijen bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 	Laporan Hasil Kegiatan Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	35 lhk	586.600.000	DIREKTUR I
				Pelacakan Aset terkait Tindak Pidana	65 keg	1.376.700.000	
				Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	70 perkara	1.447.600.000	
1100	Pelaksanaan Kegiatan Sandi dan Produksi Intelijen		<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil kegiatan dalam rangka pengamanan informasi Intelijen Operasional Monitoring Center 	Laporan Hasil Kegiatan Produksi dan Sarana Terhadap Pelaksanaan Intelijen	60 lhk	1.008.000.000	DIREKTUR III
				Operasional Monitoring Center	12 bulan layanan	322.650.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Monitoring Center	62 LHK	1.023.000.000	
				Digital Forensik	5 LHK	158.750.000	
				Technical pasif	10 LHK	55.000.000	
				Operasional Kontra Peninderaan dan Scanning	16 LHK	274.360.000	
				Adhyaksa Command Center	12 BLN	267.900.000	
1101	Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil Kegiatan Intelijen bidang Ideologi, Sosial, Politik, Pertahanan Keamanan dan Ketertiban umum Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan 	Laporan Hasil Kegiatan Intelijen Bidang Ideologi, Sosial, Politik, Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Umum	45 lhk	1.452.500.000	DIREKTUR II
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Agung	8 laporan	108.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum		• Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka	Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung	10 kegiatan	3.048.800.000	KAPUSPENKUM

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana	Media / Sarana Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Hukum	10 Media/ Sarana	2.282.876.000	
1112	Pelaksanaan Kegiatan dan Pengamanan dan Pembangunan Strategis			Kegiatan pengawalan, pengamanan pemerintahan dan pembangunan Pusat (TP4P)	40 Kegiatan	3.048.800.000	
				Dukungan Kegiatan dan pengamanan dan Pembangunan Strategis	5 LHK	496.580.000	

RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2019

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : “Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel”.

- Misi** :
1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
 2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
 3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian MasalahPerdata dan Tata Usaha Negara;
 4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) • Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai • Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	14.882.486.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN
1098	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan		Jumlah Kegiatan di Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pengawasan Dalam Berkoordinasi dan Melakukan Evaluasi dan Monitoring	• Tim Saber Pungli	6 Laporan	933.955.000	SESJAM PENGAWASAN
				• Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	11.874.462.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Laporan Pengaduan	• Layanan Perkantoran	1 layanan	1.030.508.000	
1092	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah I		Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah I	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah I	36 lapdu	122.400.000	INSPEKTUR I
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah I	12 lapdu	87.600.000	
1093	Peningkatan Pengawasan Pelaksnaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II		Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah II	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah II	36 lapdu	122.400.000	INSPEKTUR II
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah II	12 lapdu	87.600.000	
1094	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas pokok dan wewenang di wilayah III.		Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah III	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah III	36 lapdu	122.400.000	INSPEKTUR III
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah III	12 lapdu	87.600.000	
1095	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas pokok dan wewenang di wilayah IV.		Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah IV	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah IV	36 lapdu	122.400.000	INSPEKTUR IV
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah IV	12 lapdu	87.600.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1096	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas pokok dan wewenang di wilayah V.		Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah V	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah V	36 lapdu	122.400.000	INSPEKTUR V
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah V	12 lapdu	87.600.000	
1098	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan		Jumlah Layanan Masyarakat yang Diselesaikan Pada Jaksa Agung Muda Pengawasan	Tim Saber pungli	6 laporan	658.340.000	
				Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	11.876.518.000	
				Layanan Perkantoran	1 layanan	1.256.678.000	

RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN DIKLAT TAHUN 2018

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : “Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel”.

Misi :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian MasalahPerdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM yang bersertifikat kompetensi • Indeks kepuasan peserta diklat • Indeks kepuasan stakeholder 	-	-	29.067.860.000	KEPALA BADAN DIKLAT
5006	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.		Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	Diklat penanganan ABH berdasarkan UU SPPA Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Diklat Teknis Aparatur Kejaksaan Diklat Penyelidikan kasus Intelijen Diklat illegal fishing	8 angkatan 40 angkatan 40 angkatan 1 angkatan 4 angkatan	3.017.900.000 20.828.272.000 20.828.272.000 1.099.682.000 1.374.002.000	SEKRETARIS BADAN DIKLAT/ KEPALA PUSAT DIKLAT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Diklat Mineral Batubara	4 angkatan	1.374.002.000	
				Diklat kebakaran hutan dan lahan	4 angkatan	1.374.002.000	
5007	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepimpinan		Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	9 angkatan	27.345.088.000	
5008	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan		<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi. Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah 	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	2.229.592.000	
				Layanan Perkantoran	1 layanan	53.008.863.000	
				Sarana dan Prasarana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan	1 layanan	2.581.341.000	

RENCANA KERJA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI BANGKOK TAHUN 2019

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP • Indeks kepuasan pelayanan internal 			2.071.508.000	KEPALA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI BANGKOK
1080	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok		<ul style="list-style-type: none"> • Operasional atase teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri • Layanan Perkantoran 	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	1.067.908.000	
				Layanan Perkantoran	1 layanan	1.003.600.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	Layanan Sarana dan Prasarana Internet	1 layanan	52.000.000	

RENCANA KERJA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI HONGKONG TAHUN 2019

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP • Indeks kepuasan pelayanan internal 			2.150.124.000	KEPALA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI HONGKONG
1080	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Perwakilan Kejaksaan RI di Riyadh		<ul style="list-style-type: none"> • Operasional atase teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri • Layanan Perkantoran 	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	1.160.884.000	
				Layanan Perkantoran	1 layanan	989.240.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	670.000.000	
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	6 Sarana/ prasarana	670.000.000	

RENCANA KERJA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI RIYADH TAHUN 2019

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP • Indeks kepuasan pelayanan internal 			2.065.372.000	KEPALA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI RIYADH
1080	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Perwakilan Kejaksaan RI di Riyadh		<ul style="list-style-type: none"> • Operasional atase teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri • Layanan Perkantoran 	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	1.276.129.000	
				Layanan Perkantoran	1 layanan	789.243.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	104.153.799.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	563.122.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	103.590.677.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	7.611.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	7.611.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	721.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	4 kegiatan	60.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	135 Lapdu	459.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	20 Lapdu	202.000.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.428.756.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	53.016.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	10 laporan	189.900.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	6 laporan	60.580.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di	7 laporan	101.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kejati dan Kejari			
				Burou tindak pidana/DPO yang ditangkakp	8 kegiatan	403.280.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	8 Kegiatan	75.680.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	18 kegiatan	108.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	56 kegiatan	436.800.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	9.333.878.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1700 perkara	950.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1500 perkara	7.757.528.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1500 perkara	375.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2 perkara	20.750.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1 perkara	135.600.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	1 perkara	20.000.000	
				Pelaksanaan ekaminasi dan ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	3.017.140.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	6 perkara	300.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	6 Perkara	600.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	2 perkara	25.600.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	20 perkara	758.200.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	65 perkara	81.900.000	
				Eksaminasi perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	145.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	147.480.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	4 perkara	48.460.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari 	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	8 Kegiatan	75.680.000	
			<ul style="list-style-type: none"> Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	6 perkara	34.500.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI JABAR.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	220.728.081.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	3.024.117.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	217.703.964.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	-	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Layanan	-	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	-	-	690.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 				
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	25 kegiatan	250.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	70 Lapdu	238.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	20 Lapdu	202.000.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara • Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	3.741.651.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	90.466.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	50 laporan	698.050.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan	26 laporan	246.580.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Negeri			
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	27 laporan	391.500.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkap	5 kegiatan	209.375.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
		Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari		25 Kegiatan	236.500.000		
		Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah		78 kegiatan	468.000.000		
		Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)		176 kegiatan	1.372.800.000		
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	19.989.150.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum 	Perkara Pidana Umum yang	4.416	1.984.800.000	KAJATI/KAJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tlinggi	perkara 4.116 perkara 4.116 perkara 2 perkara 1 perkara 1 perkara 1 laporan	 16.724.000.000 1.029.000.000 20.750.000 135.600.000 20.000.000 75.000.000	DAN KACABJARI
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	11.976.980.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Pidana Khusus sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		• Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	25 perkara	1.250.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	25 perkara	2.500.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	6 perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	9 perkara	397.710.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan	39 perkara	1.848.600.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II			
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	27 perkara	2.254.500.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	36 perkara	69.100.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	447.460.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	1 perkara	12.115.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Kejati, Kejari maupun Cabjari <ul style="list-style-type: none"> • Terselaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Pertimbangan Hukum /Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	93 perkara	279.345.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	26 perkara	156.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	239.274.201.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	3.125.635.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	236.148.566.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	7.675.860.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	6 Layanan	7.675.860.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	-	-	741.500.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 				
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	38 Kegiatan	420.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	50 Lapdu	170.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	15 Lapdu	151.500.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	5.179.591.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 Laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	73 Laporan	995.720.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Tindak Pidana Buron 	Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari Buron tindak pidana/DPO yang ditangkap	37 Laporan 39 Laporan 5 Kegiatan	348.880.000 565.500.000 209.375.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati. Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	3 Kegiatan 37 Kegiatan 112 kegiatan 244 kegiatan	28.380.000 350.020.000 672.000.000 1.903.200.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa 	-	-	21.995.050.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 				
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan • Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	4.837 Perkara	2.111.100.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	4.537 Perkara	18.245.000.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	4.537 Perkara	1.229.250.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	3 Perkara	23.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2 Perkara	271.200.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	2 Perkara	40.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana	• Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara	• Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya	-	-	13.740.800.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus • Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa • Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	37 Perkara	1.850.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	37 Perkara	3.700.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan	2 Perkara	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				pada tahap pra penuntutan di Kejaksaan Tinggi			
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	4 Perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	3 Perkara	132.570.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	40 Perkara	1.886.370.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	66 Perkara	5.511.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	47 Perkara	59.220.000	
				Eksaminasi Perkara Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	25.000.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	612.460.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	4 Perkara	48.460.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	114 Perkara	342.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none">Operasional Pos Pelayanan Hukum	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	37 Perkara	222.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI DIY

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	96.432.942.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	519.064.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	95.913.878.000	
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	193.500.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	2 kegiatan	75.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	20 Lapdu	68.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang	5 Lapdu	50.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kejaksaan Negeri			
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.119.901.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	71.741.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	10 laporan	171.175.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	6 laporan	60.580.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	7 laporan	101.500.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkapi	3 kegiatan	125.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	5 Kegiatan	47.300.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D	Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	18 kegiatan	108.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	52 kegiatan	405.600.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	4.734.100.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1055 perkara	646.500.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	905 perkara	3.620.000.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	905. perkara	226.250.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2 perkara	20.750.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1 perkara	135.600.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	1 perkara	20.000.000	
				Pelaksanaan eksaminasi dan ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	65.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	1.787.340.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KA CABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di	2 perkara	200.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kejaksaan Tinggi			
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5 perkara	300.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	5 Perkara	250.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus tertentu yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati/Kejari/Cabjari	3 Perkara	37.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati/Kejari/Cabjari	6 Perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	10 perkara	441.900.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	5 perkara	6.300.000	
				Eksaminasi perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejati	1 laporan	25.000.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	147.460.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	4 perkara	48.460.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	21 perkara	63.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none">Operasional Pos Pelayanan Hukum	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	6 perkara	36.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	264.863.888.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	3.590.397.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	261.273.491.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	25.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	25.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	685.500.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara didaerah	Pelaksanaan Inspeksi	38 Kegiatan	450.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	25 Lapdu	85.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	15 Lapdu	151.500.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	5.386.671.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 Laporan	77.091.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	76 Laporan	1.066.065.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	39 Laporan	367.480.000	
				Laporan Pelaksanaan	40 Laporan	580.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari			
				Buruk tindak pidana/DPO yang ditangkap	5 Kegiatan	209.375.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 Kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	38 Kegiatan	359.480.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	117 Kegiatan	702.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	256 kegiatan	1.996.800.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	34.012.350.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada	7.245 Perkara	2.943.500.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negeri		Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan • Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kejati/Kejari/Cabjari			
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	6.895 Perkara	27.684.000.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	6.895 Perkara	1.755.750.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	9 Perkara	70.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	6 Perkara	813.600.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	6 Perkara	120.000.000	
				Pelaksanaan eksaminasi dan ektradisi di Kejati	1 Laporan	625.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	15.425.710.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	3 Perkara	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	3 Perkara	300.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	38 Perkara	1.900.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	38 Perkara	3.800.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	5 Perkara	62.500.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di Kejati	6 Perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	9 Perkara	397.710.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	33 Perkara	1.564.200.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	72 Perkara	6.948.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	41 Perkara	51.660.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	642.460.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di	4 Perkara	48.460.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum	Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)		360.000.000	
				Petimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	120 Perkara		
					Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	39 Satker	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI ACEH.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal	-	-	124.066.362.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1.700.552.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	122.365.810.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	1.000.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1.000.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP	-	-	721.500.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	11 Kegiatan	400.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	50 Lapdu	170.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	15 Lapdu	151.500.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	3.480.621.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 Laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus	48 Laporan	654.720.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Tindak Pidana	Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri			
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	24 Laporan	227.980.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	27 Laporan	391.500.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkapp	3 Kegiatan	80.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 Kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	25 Kegiatan	236.500.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	74 Kegiatan	444.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	168 Kegiatan	1.310.400.000	
006.01.	Program Penanganan Dan Penye-	Meningkatnya penegakan	Persentase terbuktinya perkara	-	-	15.649.050.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
07	lesaian Perkara Pidana Umum	hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum				
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan • Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.964 perkara	1.329.200.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.764 perkara	11.868.300.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	2.764 perkara	879.400.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada	13 perkara	96.750.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kejati/Kejari/Cabjari			
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	9 perkara	1.220.400.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	9 perkara	180.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus	-	-	10.963.710.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	25 Perkara	1.250.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	25 Perkara	2.500.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	25.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari / Cabjari	4 Perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak	3 Perkara	132.570.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I			
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	10 Perkara	474.000.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	58 Perkara	5.974.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri,	25 Perkara	31.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				dan Cabjari			
				Eksaminasi Perkara Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	25.000.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	-	-	417.460.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	4 Perkara	48.460.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Petimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	75 Perkara	225.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	24 Satker	144.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	191.039.852.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	3.695.452.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	187.344.400.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	74.942.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	74.942.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	1.267.500.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	28 kegiatan	760.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	75 Lapdu	255.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	25 Lapdu	252.500.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	4.650.971.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	98.491.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	65 laporan	894.625.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	29 laporan	274.480.000	
				Laporan Pelaksanaan	39 laporan	565.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari			
				Buruk tindak pidana/DPO yang ditangkapi	5 kegiatan	209.875.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	37 Kegiatan	350.020.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	96 kegiatan	576.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	212 kegiatan	1.653.600.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	25.877.250.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada	4.231 perkara	1.874.300.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negeri		Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	3.956 perkara 3.956 perkara 34 perkara 28 perkara 28 perkara	17.797.550.000 1.588.600.000 185.000.000 3.796.800.000 560.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP 	-	-	14.803.170.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari/Cabjari	37 perkara	1.850.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	37 Perkara	3.700.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan Kejati	6 Perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	9 perkara	397.710.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	8 perkara	379.000.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	76 perkara	7.828.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	4 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	37 perkara	46.620.000	
				Eksaminasi perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	492.460.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	4 perkara	48.460.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Pertimbangan Hukum/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	90 perkara	270.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	29 perkara	174.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	114.459.766.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1.250.564.000	KAJATI/KAJA RI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	113.209.202.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	92.510.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan	92.510.000	KAJATI/KAJA RI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak 	-	-	439.700.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP				
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	2 Kegiatan	250.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	35 Lapdu	119.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	7 Lapdu	70.700.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.902.216.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 Laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	38 Laporan	518.320.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	17 Laporan	162.880.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	24 Laporan	348.000.000	
				Buruk tindak pidana/DPO yang ditangkakp	5 Kegiatan	142.800.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 Kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	22 Kegiatan	208.120.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	57 Kegiatan	342.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	134 Kegiatan	1.045.200.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	11.518.750.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap	2.279 perkara	1.123.700.000	KAJATI/KAJARI DAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari Pelaksanaan eksaminasi dan ekstradisi di Kejati			KACABJARI
					2.079 perkara	565.750.000	
					12 perkara	94.000.000	
					8 perkara	1.084.800.000	
					8 perkara	160.000.000	
					1 Laporan	25.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	7.921.130.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejati/kejari/cabjari	6 Perkara	300.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5 Perkara	500.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari/Cabjari	22 Perkara	1.100.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	22 Perkara	2.200.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	5 Perkara	62.500.000	
				Perkara Tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan Kejati	2 Perkara	24.800.000	
				Perkara Tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	4 Perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan	3 Perkara	132.570.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil I			
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil II	15 Perkara	758.400.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil III	31 Perkara	2.588.500.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejati/Kejari/Cabjari	1 Perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejati/Kejari/Cabjari	24 Perkara	52.720.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	312.460.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	4 Perkara	48.460.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
			Petimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	54 Perkara	162.000.000		
			Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	204 Perkara	102.000.000		

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI RIAU.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	84.573.002.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1.208.925.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	12 Layanan	83.364.077.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	2.900.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	2.900.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, 	-	-	472.700.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		BPKP				KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara didaerah	Pelaksanaan Inspeksi	12 kegiatan	300.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	30 Lapdu	102.000.000	
			Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	7 Lapdu	70.700.000		
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.013.481.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	86.186.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	24 laporan	347.690.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	13 laporan	125.680.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	14 laporan	203.000.000	
				Buruk tindak pidana/DPO yang ditangkakp	3 kegiatan	110.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
		Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari		12 Kegiatan	113.520.000		
		Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah		39 kegiatan	234.000.000		
		Kegiatan Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)		98 kegiatan	764.400.000		
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	14.713.900.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap	2546 perkara	1.203.800.000	KAJATI/KAJARI DAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejari/ Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejari/Cabjari Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	2346 perkara 2346 perkara 20 perkara 16 perkara 16 perkara 1 Laporan	10.047.000.000 782.500.000 116.000.000 2.169.600.000 320.000.000 75.000.000	KACABJARI
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP 	-	-	4.210.310.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	12 perkara	600.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	12 Perkara	1.200.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	25.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	4 perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan	3 perkara	132.570.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I			
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	29 perkara	1.660.980.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	51.260.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	12 perkara	38.860.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	252.460.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	4 perkara	48.460.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	42 perkara	126.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	24 Satker	78.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI JAMBI.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	71.041.488.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	777.606.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	70.263.882.000	
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	440.200.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	9 kegiatan	200.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	35 Lapdu	119.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	12 Lapdu	121.200.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri			
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.851.201.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	90.466.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	22 laporan	316.130.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	11 laporan	107.080.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	14 laporan	203.000.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkakp	3 kegiatan	80.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	12 Kegiatan	113.520.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D	Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	35 kegiatan	210.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	90 kegiatan	702.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	7.950.550.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.595 perkara	918.500.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.395 perkara	6.110.400.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1.395 perkara	511.950.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	3 perkara	23.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2 perkara	271.200.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	2 perkara	40.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	4.090.720.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di	2 perkara	200.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kejaksaan Tinggi			
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	12 perkara	600.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	12 Perkara	1.200.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	6 perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	10 perkara	445.110.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	7 perkara	331.800.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	11 perkara	897.050.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	12 perkara	15.120.000	
				Eksaminasi Perkara Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	25.000.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	222.460.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	4 perkara	48.460.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari 	Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	36 perkara	108.000.000	
			<ul style="list-style-type: none"> • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	132 Satker	66.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP • Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	110.512.428.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	608.400.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	109.904.028.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	86.581.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	86.581.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) • Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai • Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	760.200.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	3 kegiatan	520.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	35 Lapdu	119.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	12 Lapdu	121.200.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.488.251.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	79.766.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	30 laporan	435.950.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	16 laporan	153.580.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di	17 laporan	246.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kejati dan Kejari			
				Buruk tindak pidana/DPO yang ditangkapi	5 kegiatan	209.375.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	18 kegiatan	170.280.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	48 kegiatan	288.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	116 kegiatan	904.800.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	14.866.200.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.933 perkara	1.319.900.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada	2.733 perkara	11.462.400.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Kejati/Kejari/Cabjari			
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	2.733 perkara	846.450.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 perkara	73.250.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	7 perkara	949.200.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	7 perkara	140.000.000	
				Pelaksanaan eksaminasi dan ekstradisi di Kejati	1 laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	5.253.210.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	17 perkara	850.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	17 perkara	1.700.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan Kejati	6 perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan di Kejati	40 Perkara	2.432.670.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	16 Perkara	43.900.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	285.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		• terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			• terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari	Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	51 perkara	153.000.000	
			• Operasional Pos Pelayanan Hukum	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	192 perkara	96.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	97.008.460.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	708.982.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	96.299.478.000	
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	450.500.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	12 kegiatan	200.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	41 Lapdu	139.400.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	11 Lapdu	111.100.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri			
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.089.491.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	90.466.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	25 laporan	357.050.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	12 laporan	116.380.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	16 laporan	232.000.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkapi	5 kegiatan	134.375.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejari/Cabjari	14 kegiatan	132.440.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			KKN dan TP4D	Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	39 kegiatan	234.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	98 kegiatan	764.400.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	9.040.600.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.776 perkara	972.800.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.576 perkara	6.526.300.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.576 perkara	462.400.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	9 perkara	70.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	6 perkara	813.600.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	6 perkara	120.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	4.446.180.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di	2 perkara	200.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kejaksaan Tinggi			
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	14 perkara	700.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	14 Perkara	1.400.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di Kejati	2 Perkara	25.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	4 Perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	8 perkara	363.150.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	15 perkara	711.000.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di	7 perkara	652.750.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kejari/Cabjari Wil.III			
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	14 perkara	17.640.000	
				Eksaminasi Perkara Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	25.000.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	225.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian		• terselesaikannya Penanganan	Perkara Perdata dan Tata	3 perkara	27.345.000	KAJATI/KAJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari <ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi) Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	 42 perkara 12 satker	 126.000.000 72.000.000	DAN KACABJARI

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	73.312.348.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	866.900.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	72.445.448.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	253.374.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	4 Layanan	253.374.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, 	-	-	412.600.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		BPKP				KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara didaerah	Pelaksanaan Inspeksi	8 kegiatan	250.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	30 Lapdu	102.000.000	
			Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	6 Lapdu	60.600.000		
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.976.541.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	66.391.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	24 laporan	367.485.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	12 laporan	116.380.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	15 laporan	217.500.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkakp	3 kegiatan	80.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	16 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
		Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari		13 Kegiatan	122.980.000		
		Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah		38 kegiatan	228.000.000		
		Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)		96 kegiatan	748.800.000		
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	9.737.400.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap	1870 perkara	1.001.000	KAJATI/KAJARI DAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari Pelaksanaan ekaminasi dan ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	- 1670 perkara 1670 perkara 11 perkara 8 perkara 8 perkara 1 laporan	- 6.865.900.000 474.700.000 76.000.000 1.084.800.000 160.000.000 75.000.000	KACABJARI
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP 	-	-	5.098.190.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	13 perkara	650.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	13 Perkara	1.300.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	6 Perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	24 perkara	2.254.140.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	3 perkara	132.570.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	2 perkara	142.200.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	14 perkara	17.640.000	
				Eksaminasi perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	225.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	41 perkara	117.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12 perkara	72.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KALTENG.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	69.070.956.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1.148.045.000	
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	67.922.911.000	
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	389.700.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara didaerah	Pelaksanaan Inspeksi	12 kegiatan	200.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	35 Lapdu	119.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui	7 Lapdu	70.700.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri			
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.293.361.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	67.996.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	29 laporan	434.080.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	15 laporan	144.280.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	17 laporan	246.500.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkap	3 kegiatan	80.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati, Kejari dan Cabjari	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejari dan Cabjari	15 kegiatan	141.900.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Kelompok Masyarakat dan Sekolah yang diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	46 kegiatan	276.000.000	
				Kegiatan Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	112 kegiatan	873.600.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	8.502.550.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.615 perkara	924.500.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari	1.415 perkara	6.044.800.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Upaya Hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejari/Cabjari	1.415 perkara	472.150.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	8 perkara	52.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari	6 perkara	813.600.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejari/Cabjari	6 perkara	120.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	5.352.560.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejati/Kejari/Cabjari	17 perkara	850.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap Penyidikan di	17 perkara	1.700.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kejati/Kejari/Cabjari			
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di Kejaksaan Tinggi	6 perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	3 perkara	132.570.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	18 perkara	853.200.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	15 perkara	1.496.250.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	25.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di	15 perkara	68.900.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari			
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	270.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Pertimbangan Hukum/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	48 perkara	144.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	15 perkara	90.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	84.482.473.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	592.752.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	83.889.721.000	
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	372.700.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	3 kegiatan	200.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	30 Lapdu	102.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang	7 Lapdu	70.700.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kejaksaan Negeri			
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.108.821.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalian di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	26 laporan	354.640.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	14 laporan	134.980.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	15 laporan	217.500.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkap	3 kegiatan	80.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati/Kejari/Cabjari	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	13 Kegiatan	122.980.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D	Kelompok Masyarakat dan Sekolah yang diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	42 kegiatan	252.000.000	
				Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	104 kegiatan	811.200.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	13.045.100.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.720 perkara	1.256.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari	2.520 perkara	10.080.000.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejari/ Cabjari	2.520 perkara	630.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	9 perkara	70.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari	6 perkara	813.600.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejari/Cabjari	6 perkara	120.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	4.492.340.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejati/Kejari/Cabjari	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di	2 perkara	200.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kejakati/Kejari/Cabjari			
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	13 perkara	650.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	13 Perkara	1.300.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	25.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari dan Cabjari	4 Perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	32 perkara	1.924.320.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	13 perkara	66.380.000	
				Eksaminasi Perkara Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	255.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		• Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			• Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari	Pertimbangan Hukum/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	45 perkara	135.000.000	
			• Operasional Pos Pelayanan Hukum	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	14 satker	84.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	75.666.109.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	855.889.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	74.810.220.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	153.204.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	153.204.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak 	-	-	635.700.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP				
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara didaerah	Pelaksanaan Inspeksi	23 kegiatan	480.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	25 Lapdu	85.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	7 Lapdu	70.700.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.155.621.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 laporan	106.516.000	
				Laporan hasil kegiatan penyeidikan/pengamanan/pe nggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	26 laporan	354.640.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN			
			Aset Terkait Pidana • Pencarian/Penangkapan Tindak Pidana	Buron	Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	14 laporan	134.980.000	
					Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	15 laporan	217.500.000	
					Buron tindak pidana/DPO yang ditangkapi	3 kegiatan	80.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		• Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana • Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D		Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati, Kejari dan Cabjari	4 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
					Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	13 Kegiatan	122.980.000	
					Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	42 kegiatan	252.000.000	
					Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	110 kegiatan	858.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP 		-	-	13.131.933.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 				
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2300 perkara	1.240.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2050 perkara	9.072.563.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	2050 perkara	772.170.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	16 perkara	105.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	12 perkara	1.627.200.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	12 perkara	240.000.000	
				Perlaksana Eksaminasi dan ekstradisi di Kejaksaan Negeri	1 Laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya 	-	-	6.981.370.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Korupsi	berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<p>kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa • Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	13 kasus	650.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	13 Perkara	1.300.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan	6 perkara	176.640.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Tinggi/Kejari/Cabjari			
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	4 perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	9 perkara	397.710.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	23 perkara	3.864.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	14 perkara	16.380.000	
				Eksaminasi perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi	20 laporan	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	255.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	1 perkara	12.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	53 perkara	159.000.000		
			Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	14 satker	84.000.000		

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	65.945.435.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1.919.287.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	64.026.148.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	75.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan	75.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	455.700.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara didaerah	Pelaksanaan Inspeksi	3 Kegiatan	300.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	25 Lapdu	85.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	7 Lapdu	70.700.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.021.541.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 Laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	24 Laporan	327.360.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	12 Laporan	116.380.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	15 Laporan	217.500.000	
				Buruk tindak pidana/DPO yang ditangkap	3 Kegiatan	125.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana • Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 		Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 Kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	13 Kegiatan	122.980.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	38 Kegiatan	228.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	96 Kegiatan	748.800.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum • Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa • Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	9.605.785.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana umum 	Perkara Pidana Umum yang	1.437	981.100.000	KAJATI/KAJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Pengendalian penggunaan upaya hukum, dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	Perkara 1.187 Perkara 1.187 Perkara 24 Perkara 20 Perkara 20 Perkara 1 Laporan	 4.992.325.000 318.350.000 127.000.000 2.712.000.000 400.000.000 75.000.000	DAN KACABJARI
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan 	-	-	5.481.590.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa <ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	13 Perkara	650.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	13 Perkara	1.300.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	6 Perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	3 Perkara	132.570.000	
				Perkara Tindak pidana	27 Perkara	2.781.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III			
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	13 Perkara	16.380.000	
				Eksaminasi Perkara Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	225.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 Perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	39 Perkara	117.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12 Satker	72.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SULTENG.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	65.811.322.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	756.806.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	65.054.516.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	6.817.679.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	5 Layanan	6.817.679.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	622.700.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur		Jumlah laporan pengaduan masyarakat	Pelaksanaan Inspeksi	1 kegiatan	450.000.000	KAJATI/KAJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	30 Lapdu	102.000.000	DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	7 Lapdu	70.700.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.561.601.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalian di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	34 laporan	463.760.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	11 laporan	107.080.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	26 laporan	377.000.000	
				Buron tindak pidana/DPO	3 kegiatan	80.625.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	yang ditangkapi			KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	24 Kegiatan	227.040.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	47 kegiatan	282.000.000	
			Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	114 kegiatan	889.200.000		
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	10.055.800.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1786 perkara	1.055.800.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap	1536 perkara	6.957.800.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari Pelaksanaan eksaminasi dan ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1536 perkara 10 perkara 8 perkara 8 perkara 1 perkara	634.400.000 58.000.000 1.084.800.000 160.000.000 75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	8.041.950.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	26 kasus	1.300.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	26 Perkara	2.600.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	6 perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	3 perkara	132.570.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	35 perkara	3.377.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	512600.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	24 perkara	53.980.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	210.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang	36 perkara	108.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum	diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)			
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	11 Satker	66.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2018

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	170.906.892.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	3.493.152.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	167.413.740.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	1.100.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	6 Layanan	1.100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	1.042.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	1 kegiatan	500.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	100 Lapdu	340.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	20 Lapdu	202.000.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	4.731.096.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	90.466.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	65 laporan	902.650.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	29 laporan	274.480.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	39 laporan	565.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Buruk tindak pidana/DPO yang ditangkapi	8 kegiatan	290.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	37 kegiatan	350.020.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	96 kegiatan	576.000.000	
				Kegiatan Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	212	1.653.600.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 		-	19.969.450.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum 				

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	3.950 perkara	2.010.000.000	
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	3.575 perkara	14.840.500.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	3.575 perkara	1.053.750.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	17 perkara	123.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	12 perkara	1.627.200.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	12 perkara	240.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi Di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh 			13.258.310.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		masyarakat terhadap Kejaksaan RI	Jaksa <ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi,	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari/Cabjari	37 kasus	1.850.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	37 Perkara	3.700.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	10 Perkara	125.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Kejari/Cabjari	15 perkara	662.850.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Kejati	2 perkara	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	4 perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	63 perkara	6.322.200.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	39 perkara	121.620.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 			480.345.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> • Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	8 perkara	96.920.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	68 perkara	209.425.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	29 satker	174.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SULTRA.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	59.502.727.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1.296.678.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	58.206.049.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	472.700.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	472.700.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	472.700.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	2 kegiatan	300.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	30 Lapdu	102.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	7 Lapdu	70.700.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.732.801.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	20 laporan	272.800.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	11 laporan	107.080.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	12 laporan	174.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Buruk tindak pidana/DPO yang ditangkapi	3 kegiatan	80.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	10 Kegiatan	94.600.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	33 kegiatan	198.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	86 kegiatan	670.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	7.673.400.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.323 perkara	924.900.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan • Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari	1.083 perkara	4.784.400.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, dan pelaksanaan eksekusi di Kejari/ Cabjari	1.083 perkara	409.950.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	12 perkara	78.750.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari	9 perkara	1.220.400.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejari/Cabjari	9 perkara	180.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum 	-	-	4.512.810.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			bidang Pidana Khusus				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	10 kasus	500.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	10 Perkara	1.000.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di Kejati	2 perkara	25.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di Kejari/Cabjari	4 perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	25 perkara	2.398.570.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	10 perkara	12.600.000	
				Eksaminasi Perkara Korupsi dan tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	25.000.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 			210.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Kejati, Kejari maupun Cabjari <ul style="list-style-type: none"> • Tersesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	36 perkara	108.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	11 Satker	66.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI MALUKU.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	62.575.994.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	667.956.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	61.908.038.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	600.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	12 Sarana/ Prasarana	600.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) pengaduan Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	678.500.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	12 Kegiatan	560.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	20 Lapdu	68.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	5 Lapdu	50.500.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.948.461.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 Laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	23 Laporan	313.720.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	10 Laporan	97.780.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di	16 Laporan	232.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kejati dan Kejari			
				Burou tindak pidana/DPO yang ditangkap	3 Kegiatan	125.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 Kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	14 Kegiatan	132.440.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	35 Kegiatan	210.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	90 Kegiatan	702.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	7.173.550.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.159 perkara	787.700.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		<p>dan pencari keadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<p>Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi</p>	<p>959 perkara</p> <p>959 perkara</p> <p>13 perkara</p> <p>9 perkara</p> <p>9 perkara</p> <p>1 Laporan</p>	<p>4.406.350.000</p> <p>407.350.000</p> <p>96.750.000</p> <p>1.220.400.000</p> <p>180.000.000</p> <p>75.000.000</p>	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi		<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum 	-	-	8.214.850.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			bidang Pidana Khusus				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	15 Perkara	750.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	15 Perkara	1.500.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	25.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	4 Perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	3 Perkara	132.570.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	26 Perkara	5.213.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	15 Perkara	42.640.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	195.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha		• terselesaikannya Penanganan	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang	1 Perkara	12.115.000	KAJATI/ KAJARI DAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari <ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi) Petimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	33 Perkara 21 Satker	99.000.000 84.230.000	KACABJARI

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI BALI

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	91.532.686.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	220.965.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	91.331.721.000	
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) pengaduan Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	442.600.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	8 kegiatan	280.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	30 Lapdu	102.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui	6 Lapdu	60.600.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri			
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.720.411.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	19 laporan	259.160.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	10 laporan	97.780.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	12 laporan	174.000.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkap	5 kegiatan	134.375.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana <ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	10 Kegiatan	94.600.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	31 kegiatan	186.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	80 kegiatan	639.600.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	7.313.100.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.424 perkara	911.200.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.204 perkara	4.847.200.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1.204 perkara	310.600.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	9 perkara	70.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	6 perkara	813.600.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	6 perkara	120.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	240.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	3.198.970.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	10 Perkara	500.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	10 Perkara	1.000.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	2 Perkara	25.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	4 Perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	17 perkara	751.230.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	5 perkara	237.000.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	1 perkara	96.500.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	10 perkara	12.600.000	
				Eksaminasi Perkara Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati	1 Laporan	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	195.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			Petimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	33 perkara	99.000.000		
			Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	10 Satker	60.000.000		

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	56.074.821.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	873.250.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	55.201.571.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	108.000.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan	188.000.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	452.700.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	2 Kegiatan	280.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	30 Lapdu	102.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	7 Lapdu	70.700.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.276.441.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 Laporan	63.716.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	12 Laporan	206.480.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari Buron tindak pidana/DPO yang ditangkap	7 Laporan 8 Laporan 3 Kegiatan	69.880.000 116.000.000 125.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	9 Kegiatan 21 Kegiatan 62 Kegiatan	85.140.000 126.000.000 483.600.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan 	-	-	8.087.100.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum				
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	980 Perkara	778.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari	760 Perkara	3.040.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap upaya hukum, dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	760 Perkara	190.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejari/Cabjari	6 Perkara	813.600.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejari/Cabjari	6 Perkara	120.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa 	-	-	2.544.170.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi, Kejari/Cabjari	2 Perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari/Cabjari	6 Perkara	300.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	6 Perkara	600.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di Kejati	6 Perkara	176.640.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	5Perkara	132.570.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	6 Perkara	284.400.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	6 Perkara	618.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	7 Perkara	32.560.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	150.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		• Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 Perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			• Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari	Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Non	24 Perkara	72.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Litigasi)			
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	7 Satker	42.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI NTT.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	82.556.297	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	775.012.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	81.781.285.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	125.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	3 Layanan	125.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	838.700.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	23 kegiatan	700.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	20 Lapdu	68.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	7 Lapdu	70.700.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.773.581.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	36 laporan	491.040.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	18 laporan	172.180.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di	21 laporan	304.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kejati dan Kejari			
				Buruk tindak pidana/DPO yang ditangkakp	3 kegiatan	125.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 		Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	19 Kegiatan	179.740.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	56 kegiatan	336.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	132 kegiatan	1.029.600.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	10.293.950.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.948 perkara	1.189.400.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.673 perkara 1.673 perkara 16 perkara 10 perkara 10 perkara	6.866.200.000 471.850.000 135.500.000 1.356.000.000 200.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejati	1 Laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum 	-	-	10.914.530.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			bidang Pidana Khusus				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	19 Perkara	950.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	19 Perkara	1.900.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	25.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	4 perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	5 perkara	220.950.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	36 perkara	7.218.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	19 perkara	23.940.000	
				Eksaminasi Perkara Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati	1 Laporan	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	315.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			Petimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	57 perkara	171.000.000		
			Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	18 Satker	108.000.000		

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI PAPUA.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	66.572.504.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	870.774.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	65.701.730.000	
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	838.900.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	10 kegiatan	600.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	20 Lapdu	137.600.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui	5 Lapdu	101.300.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri			
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.862.569.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari Buron tindak pidana/DPO yang ditangkakp	3 laporan 22 laporan 12 laporan 3 kegiatan	106.516.000 300.080.000 116.380.000 188.500.000 131.853.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati, Kejari dan Cabjari	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana <ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	11 Kegiatan	104.060.000	
				Kelompok Masyarakat dan Sekolah yang diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	36 kegiatan	216.000.000	
				Kegiatan Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	86 kegiatan	670.800.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	10.674.350.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.170 perkara	1.126.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari	1.045 perkara	6.269.200.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejari/Cabjari	1.045 Perkara	679.250.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	22 perkara	326.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari	14 perkara	1.898.400.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejari/Cabjari	14 perkara	280.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	95.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	8.940.500.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	2 perkara	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	2 perkara	250.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	11 Perkara	825.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	11 Perkara	1.375.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	200.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan Kejaksaan Tinggi	6 perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	5 perkara	375.000.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	22 perkara	5.500.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	12 perkara	38.860.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 			309.101.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di	2 perkara	39.101.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum	Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi) Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	39 perkara	195.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12 satker	75.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	52.973.548.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	677.236.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	52.296.312.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	2.550.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	3 Layanan	2.550.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	238.700.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara didaerah	Pelaksanaan Inspeksi	10 kegiatan	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	20 Lapdu	68.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	7 Lapdu	70.700.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.607.461.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	18 laporan	245.520.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	10 laporan	97.780.000	
				Laporan Pelaksanaan	11 laporan	159.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari			
				Buruk tindak pidana/DPO yang ditangkapi	3 kegiatan	80.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
		Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari		9 Kegiatan	85.140.000		
		Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah		30 kegiatan	180.000.000		
		Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)		80 kegiatan	624.000.000		
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	6.138.550.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada	1230 perkara	853.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negeri		Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	1010 perkara 1010 perkara 4 perkara 3 perkara 3 perkara	4.365.000.000 352.500.000 26.250.000 406.800.000 60.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejati	1 laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP 	-	-	3.287.150.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.00.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	9 perkara	450.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	9 Perkara	900.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	6 perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	3 perkara	132.570.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	13 perkara	616.200.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	7 perkara	575.400.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	5 perkara	30.040.000	
				Eksaminasi perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi	5 perkara	6.300.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	195.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	33 perkara	99.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	10 satker	60.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	41.979.833.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	492.856.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	41.486.977.000	
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	368.500.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	2 kegiatan	250.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	20 Lapdu	68.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang	5 Lapdu	50.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kejaksaan Negeri			
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.519.321.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	16 laporan	218.240.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	9 laporan	88.480.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	10 laporan	145.000.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkapi	3 kegiatan	125.625.000	
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan 	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	8 Kegiatan	75.680.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D	Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	27 kegiatan	162.000.000	
				Kegiatan Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	73 kegiatan	569.400.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	5.686.320.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	821 perkara	576.300.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari	671 perkara	2.857.870.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejari/ Cabjari	671 perkara	204.950.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	16 perkara	105.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejari/Cabjari	12 perkara	1.627.200.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejari/Cabjari	12 perkara	240.000.000	
				Pelaksanaan Eksminasi dan Ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 Laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	5.352.790.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	9 perkara	450.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di	2 perkara	200.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kejaksaan Tinggi			
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 perkara	50.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	8 Perkara	800.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan Kejati	2 Perkara	25.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di Kejari dan Cabjari	4 Perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	3 perkara	132.570.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	17 perkara	3.408.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	8 perkara	10.080.000	
				Eksaminasi Perkara Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati	1 Laporan	25.000.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	180.345.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		• Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			• Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari	Pertimbangan Hukum/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	30 perkara	90.000.000	
			• Operasional Pos Pelayanan Hukum	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	9 Satker	54.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI BANTEN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	67.603.580.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	483.876.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	67.119.704.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	1.495.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan	1.495.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak 	-	-	208.600.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP				
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	3 kegiatan	80.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	20 Lapdu	68.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	6 Lapdu	60.600.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.356.781.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	106.516.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	14 laporan	190.960.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	8 laporan	79.180.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	9 laporan	130.500.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkakp	3 kegiatan	80.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 		Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	7 Kegiatan	66.220.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	24 kegiatan	144.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	68 kegiatan	530.400.000	
				-	-	8.257.950.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	8.257.950.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap	1815 perkara	984.500.000	KAJATI/KAJARI DAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari Pelaksanaan Eksaminasi dan ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	- 1615 perkara 1615 perkara 3 perkara 2 perkara 2 perkara 1 laporan	- 6.460.000.000 403.750.000 23.500.000 271.200.000 40.000.000 75.000.000	KACABJARI
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP 	-	-	2.659.660.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	9 Kasus	450.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	8 Perkara	800.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	2 perkara	25.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/ Cabjari	4 perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan	18 perkara	795.420.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I			
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	7 perkara	12.600.000	
				Eksaminasi perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi	1 perkara	25.000.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	165.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha		• terselesaikannya Penanganan	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang	3 perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari <ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi) Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	27 perkara 8 satker	81.000.000 48.000.000	KACABJARI

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	49.237.834.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	965.610.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	48.272.224.000	
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	253.400.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	4 kegiatan	145.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	20 Lapdu	68.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui	4 Lapdu	40.400.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri			
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.408.181.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari Buron tindak pidana/DPO yang ditangkap	3 laporan 15 laporan 8 laporan 10 laporan 3 kegiatan	64.786.000 246.330.000 79.180.000 145.000.000 80.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana • Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	8 Kegiatan	75.680.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	25 kegiatan	150.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	69 kegiatan	538.200.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	6.197.050.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	945 perkara	503.500.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	845 perkara	3.906.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap upaya hokum dan pelaksanaan eksekusi di Kejari/Cabjari	845 perkara	373.250.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	12 perkara	94.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	8 perkara	1.084.800.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	8 perkara	160.000.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi dan Ekstradisi di Kejati	1 Laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus • Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa • Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	2.686.700.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	8 perkara	400.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	8 Perkara	800.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	2 perkara	25.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	4 perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	2 perkara	88.380.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	9 perkara	426.600.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	4 perkara	360.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	8 perkara	10.080.000	
				Eksaminasi Perkara Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan TInggi	1 Laporan	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	165.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 perkara	36.345.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	27 perkara	81.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	96 Satker	48.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	39.291.523.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	255.163.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	39.036.360.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	1.394.760.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1.394.760.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) pengaduan Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	248.400.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara didaerah	Pelaksanaan Inspeksi	6 kegiatan	140.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	20 Lapdu	68.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	4 Lapdu	40.400.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.223.641.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	85.116.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabjari	12 Laporan	185.080.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabjari.	7 laporan	69.880.000	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	8 laporan	116.000.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkakp	3 kegiatan	80.625.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	3 kegiatan	28.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	6 Kegiatan	56.760.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	21 kegiatan	126.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	61 kegiatan	475.800.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	3.604.050.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	708 perkara	450.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada	600 perkara	2.400.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Kejati/Kejari/Cabjari Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari Pelaksanaan Eksamnasi dan ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	600 perkara 6 perkara 3 perkara 3 perkara 1 perkara	150.000.000 62.250.000 406.800.000 60.000.000 75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	2.278.520.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	6 perkara	300.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	6 perkara	600.000.000	
				Perkara Tindak Pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	2 Perkara	25.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	4 Perkara	151.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	8 perkara	353.520.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	2 perkara	94.800.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	5 perkara	321.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	4 perkara	53.780.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	3 perkara	3.780.000	
				Eksaminasi perkara korupsi dan Tinak Pidana Khusus lainnya di Kejati	1 laporan	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	150.345.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	1 perkara	12.115.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari 	Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	32 perkara	96.000.000	
			<ul style="list-style-type: none"> Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	7 perkara	42.30.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP • Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	47.908.071.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1.241.320.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	46.666.751.000	
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	25.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	25.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	442.400.000	KAJATI
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara didaerah	Pelaksanaan Inspeksi	18 kegiatan	300.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	30 Lapdu	102.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	4 Lapdu	40.400.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.446.241.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 laporan	106.516.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabjari Laporan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejati/Kejari dan Cabjari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari Buron tindak pidana/DPO yang ditangkapi	15 laporan 7 laporan 11 laporan 3 kegiatan	204.600.000 69.880.000 159.500.000 125.625.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana • Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati. Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari. Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	3 kegiatan 9 kegiatan 24 kegiatan 67 kegiatan	28.380.000 85.140.000 144.000.000 522.600.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum • Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa 	-	-	8.254.400.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 				
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan • Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1110 perkara	553.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1010 perkara	4.355.600.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1010 perkara	312.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	24 perkara	157.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	18 perkara	2.440.800.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	18 perkara	360.000.000	
				Pelaksanaan eksaminasi dan ekstradisi di Kejaksaan Tinggi	1 laporan	75.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang	• Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara	• Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan	-	-	4.512.210.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<p>hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	9 kasus	450.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	9 Perkara	900.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	5 Perkara	138.730.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				dan penuntutan di Kejari/Cabjari			
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	6 perkara	265.140.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	3 perkara	142.200.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	9 perkara	2.179.800.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	11 perkara	86.340.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha 	-	-	150.345.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		Negara				KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			• terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	3 perkara	36.345.000	
			• terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari	Pertimbangan Hukum / Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	24 perkara	72.000.000	
			• Operasional Pos Pelayanan Hukum	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	7 Perkara	42.000.000	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO